



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya Sentani Depapre Nomor 1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR 440/ /2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JAYAPURA

TAHUN 2025

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019 tentang Standard Pelayanan Minimal
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BN.2021/No.1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standard Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
18. Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
21. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Otonomi Khusus;
22. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura pada Bab II Susunan Organisasi Bagian kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 4 ayat 1 dan 2.

23. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

KEDUA : Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi organisasi yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap RAPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional & Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program Kegiatan Perangkat Daerah

4.2 Pendanaan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

Bab V Penutup

- KETIGA** : Uraian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Kedua tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja dibuat setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal :



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jayapura

KHAIRUL LIE, SKM., M.KES
Pembina Utama Muda
NIP. 196504171990031011

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023–2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta penutup.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri nomor 900.1.15.1-1317 tentang perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025. Disamping menyajikan data perencanaan Renja juga menyajikan kinerja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan / sub kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah pusat melalui kementerian Kesehatan, Program pemerintah Provinsi dan tentunya pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

Jayapura, April 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN



KHAIRUL LIE, SKM., M.KES

NIP.196504171990031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.....	7
2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	16
2.1.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.....	16
2.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	19
2.1.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	19
2.1.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	22
2.2.1 Pengukuran Kinerja	22
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci	26
2.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	27
2.2.4. Analisis Permasalahan	28
2.2.5. Pemecahan Masalah.....	29
2.2.6. Tindak Lanjut.....	30
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.....	30
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III. TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten	47
3.3 Program dan Kegiatan.....	47

BAB III	48
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
3.1. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH.....	48
3.1.1 Kebijakan nasional Sektor Kesehatan.....	48
3.1.2 Kebijakan Provinsi Papua	50
3.1.3 Isu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP)	51
3.1.4 Kebijakan Kabupaten Jayapura.....	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.....	53
3.3 Program dan Kegiatan	61
BAB IV	63
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
4.1 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Jayapura	63
4.2 Pendanaan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah	66
BAB V	74
PENUTUP.....	74
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2025 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor/ Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2023. Renja Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Kampung, Musrenbang Distrik, Forum SKPD dan Pra Musrenbang Kabupaten.

Dari kegiatan dan dokumen tersebut, tersusunlah pagu anggaran Perangkat Daerah (PD) untuk diajukan ke pemerintah daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022-2024 dan Enam pilar transformasi kesehatan serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2024-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran-lampiran indikator program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menyelenggarakan fungsi : ” perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ”. Untuk itu diperlukan adanya suatu acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis dapat dipedomani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Kabupaten Jayapura secara terarah dan terukur yang selanjutnya disusun dalam RAPB kabupaten Jayapura.

1.2. Landasan Hukum

Dalam mewujudkan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai, untuk pelaksanaan program dan kegiatan mengacu kepada tugas dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kesehatan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019 tentang Standard Pelayanan Minimal
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BN.2021/No.1419);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standard Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
18. Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
21. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
22. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Badan Daerah Tipe A Kabupaten Jayapura pada Bab II Susunan Organisasi Bagian kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 4 ayat 1 dan 2.
23. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2025 adalah sebagai arah atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, khususnya dalam kurun waktu satu tahun mengacu pada RKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Kesehatan.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Jayapura

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Jayapura

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 dilakukan dengan menilai pencapaian indikator kinerja sasaran, sehingga diketahui berapa sasaran yang mencapai target yang ditetapkan dan berapa sasaran yang tidak memenuhi target, berapa sasaran yang melebihi target bahkan berapa sasaran yang tidak ada pencapaian sama sekali.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja pada sasaran-sasaran yang termuat dalam Renja untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD dengan menilai Indikator Input, Proses, Output dan Outcome. Rincian pengukuran dilakukan menggunakan form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dikonversikan dengan indikator kinerja kegiatan tersebut kedalam satuan yang dapat diukur seperti, pendanaan, SDM, Laporan, paket dan lain sebagainya. Tingkat keberhasilan program dan kegiatan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Jayapura**

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%								
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7							
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	0					0	-
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	0	5	5	100	0	5	20
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	2	2	100	0	2	40
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100							
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44880	0	7200	7200	100	6255	13455	30
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Laporan	4							
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	1	1	100	0	1	25
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100							
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1		1	1	100	0	1	100
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	0		0		0	0	-
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	0	1	1	100	0	1	25
1	02	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	orang		0		0			0	#DIV/0!
1	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	20	0	5	5	100	0	5	25
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	200	0	40	40	100	0	40	20
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	480	0	15	15	100	0	15	3

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	ngkat Realisasi (n-2)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Umum Perangkat Daerah	%	100							
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	0	1	1	100	-	1	25
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	60	0	15	15	100	0	15	25
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	50	0	12	12	100	0	12	24
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	5	0	2	2	100	0	2	40
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	5	0	2	2	100	1	3	60
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Unit	10							
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	20	0	20	20	100	0	20	100
1	02	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unt			1	1	100	0	1	#DIV/0!
1	02	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	50	0	12	12	100	0	12	24
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	Laporan	3				#DIV/0!			
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	0	4	0	0	0	0	-
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	5	0	1	1	100	1	2	40
1	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100							
1	02	01	2,09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	34	0	6	6	100	0	6	18
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	132	0	30	30	100	0	30	23
1	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	paket	4	0	1	1	100	0	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	%								
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan fasilitas Kesehatan di kampung	%	100							
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	unit	1	0	0	0	0	0	0	-
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	17	0	1	1	100	0	1	6
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	unit	44	0	7	7	100	0	7	16
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	unit	4	0	1	1	100	0	1	25
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	12	0	1	1	100	0	1	8
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	20	0	3	3	100	0	3	15
1	02	02	2,01	12	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	4	0				0	0	-
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PKM	52	0	10	10	100	0	10	19
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	108	0	20	20	100	0	20	19
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin	Paket	5	0	1	1	100	1	2	40
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Paket	111	0	21	21	100	0	21	19
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	200	0	30	20	67	30	50	25
1	02	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,01	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Orang	251.600	0	56600	56600	100	0	56600	22

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	ngkat Realisa		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat	%	100							
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Dokumen	4	0	1	1	100	0	1	25
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	kampung	10	0	4	4	100	0	4	40
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	32	0	5	5	100	0	5	16
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	0	0	1	1	100	1	2	#DIV/0!

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Tolak Kinerja	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	ngkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Dokumen	2							
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	0	4	4	100	0	4	80
1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100							
1	02	02	3.02	51	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Malaria Sesuai Standar	orang	253466		45462	45462	100	4700	50162	20
1	02	02	3.02	54	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar	orang	30		15	15	100	0	15	50
1	02	02	3.02	57	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	orang	3302		2091	3158	151	144	3302	100
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%								
1	02	03	2.02		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota		Orang	225							
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	836	0	141	141	100	56	197	24
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan SDM	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	0	1	1	100	1	2	40
1	02	03	2.03		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Orang	72	0						
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	0	50	50	100	0	50	25
1	02	03	3.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di		orang	22							
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah pelaku Usaha farmasi, alkes dan makanan minuman memenuhi syarat	Orang								
1	02	04	2.01		Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikak, usaha mikro obat tradisional		Dokumen	1							
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikak, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikak, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	0	1	1	100	0	1	20
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga			1							
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sarana	200	0	50	50	100	1	51	26

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dokumen	1							
1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Dokumen	1							
1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa	Unit	50							
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-minuman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	250	0	0		#DIV/0!	0	0	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
1	02	05	2,01		Advokasi Pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	Dokumen	1							
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5	0	4	4	100	0	4	80
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1							
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	0	1	1	100	0	1	25
						Meningkatkan kualitas pemenuhan SPM									
						Rata-rata capaian SPM urusan kesehatan	persen								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dokumen	1							
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Dokumen	1							
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa	Unit	50							
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-minuman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	250	0	0		#DIV/0!	0	0	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
1	02	05	2.01		Advokasi Pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat	Dokumen	1							
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	5	0	4	4	100	0	4	80
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1							
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	4	0	1	1	100	0	1	25
						Meningkatkan kualitas pemenuhan SPM									
						Rata-rata capaian SPM urusan kesehatan	persen								

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Realisasi Target kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Kinerja (n-2)	Realisasi (n-2)	ngkat Realisa		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan TW 1 (n-1)	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=6+8+10	12=(11/5)
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat	%	100							
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	orang	14.412	0	2711	2530	93,3	-	2530	18
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	orang	20.053	0	2586	3214	124,3	-	3214	16
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	orang	20.053	0	2967	3019	101,8	-	3019	15
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai standar	orang	72.213	0	11708	9232	78,9	-	9232	13
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	orang	116.180	0	9677	7453	77	-	7453	6
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	orang	612.598	0	87371	77455	89	-	77455	13
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	orang	33.591	0	16563	11.621	70,2	-	11621	35
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	orang	18.575	0	3.006	2.116	70,4	-	2116	11
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	orang	14.116	0	2.006	1.533	76,4	-	1533	11
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	1.054	0	1453	341	23,5	-	341	32
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Orang	22.028	0	7953	6349	80	92	6441	29
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	orang	252.332	0	3223	4718	146	11.366	16084	6
					TOTAL				0	263.190	242.606	92,18			

Review hasil evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2023 yang terdiri atas 5 Program, 18 kegiatan dan 80 subkegiatan yang tertuang dalam tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 8 kegiatan dan yang mendapatkan pendanaan dari kegiatan tersebut adalah 27 subkegiatan yang semuanya adalah kegiatan administrasi perkantoran atau kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan dikelola langsung oleh bagian sekretariat. Hasil evaluasi dari subkegiatan ini adalah semua target kinerja terealisasi 100% sedangkan dari realisasi anggaran terdapat 19 sub kegiatan yang terealisasi 100%, 5 subkegiatan yang terealisasi diatas 95 % yang disebabkan oleh penghematan belanja sedangkan sisanya 3 subkegiatan yaitu pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas terealisasi 66 % hal ini menyesuaikan dengan kondisi saat pengurusan Jenaza misalnya jarak tempuh dari tempat tugas, tempat pemakaman serta jumlah kematian petugas, subkegiatan berikutnya adalah pembayaran pajak kendaraan operasional yang hanya mencapai 67% disebabkan tidak semua kendaraan membayar pajak kendaraanya tepat waktu sedangkan untuk subkegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 50% hal ini disebabkan terjadi keterlambatan pengimputan realisasi pada sistim penata usahaan sehingga menjadi utang pembayaran pada tahun berikutnya.

2.1.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dan 46 subkegiatan. Berdasarkan tabel 2.1 diatas maka keberhasilan kinerja Program kegiatan berdasarkan realisasi yang dicapai dapat di gambarkan sebagai berikut :

2.1.2.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 12 sub kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja dan realisasi Keuangan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan yang Tidak mencapai Target Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat satu subkegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu hanya 67% dengan realisasi keuangan 27%, hal ini disebabkan pihak penyedia yang menjadi tempat kalibrasi alat kesehatan belum mampu mengkalibrasi beberapa alat

kesehatan tertentu dan selain itu terdapat perbedaan unit cost antara Rencana anggaran belanja dengan penyedia akibat adanya perubahan harga pada e-catalog. Dampak dari hal ini ialah tidak semua alat kesehatan dipuskesmas dapat dikalibrasi dengan waktu yang sudah ditentukan dan terdapat silpa pada penganggaran yang harus disetor kembali pada kas daerah maka pada perencanaan berikutnya perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga tidak menyebabkan realisasi kegiatan tidak tercapai.

b. Sub Kegiatan yang mencapai Target Kinerja

terdapat 11 sub kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja sangat baik yaitu mencapai 100% dengan tingkat realisasi keuangan mencapai diatas 95%.

2.1.2.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 29 subkegiatan termasuk Indikator SPM yang temuat didalamnya dengan gambaran tingkat keberhasilan realisasi kinerja dan realisasi keuangan sebagai berikut ;

a. Sub Kegiatan Tidak Mencapai Target Kinerja

Jumlah subkegiatan yang tidak mencapai target kinerja dengan penilaian rendah dan sangat rendah yakni dibawah 65% berjumlah 1 sub kegiatan yaitu subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat dengan capaian realisasi kinerja hanya mencapai 23,3% hal ini karena terjadinya perubahan indikator pada subkegiatan tersebut sehingga menyebabkan naiknya jumlah sasaran yang harus dicapai, sedangkan subkegiatan dengan penilaian sedang dan tinggi dengan nilai 65,1- 90% berjumlah 7 sub kegiatan yang disebabkan masih kurangnya motivasi, inovasi bahkan kreatifitas petugas atau tingginya angka sasaran yang harus dicapai hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak terlayani dengan baik sehingga Selanjutnya perlu meningkatkan kinerja petugas kesehatan dalam mencapai kinerja sesuai target yang telah ditentukan. Realisasi kinerja anggaran tercapai diatas 80% akibat penghematan.

b. Sub Kegiatan Mencapai Target Kinerja

Sub kegiatan yang telah mencapai target yakni 100% berjumlah 17 subkegiatan dan penilainya cukup tinggi yakni diatas 90% berjumlah 1

subkegiatan yakni Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang mencapai 93.3%

c. Sub Kegiatan Melebihi Target Kinerja

Terdapat 3 subkegiatan yang mencapai target melebihi dari 100% yakni sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 124,3%, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir 101,8% dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 146%. Hal ini disebabkan adanya pasien yang dilayani berasal dari luar wilayah karena tingginya tingkat mobilitas penduduk mengingat kabupaten Jayapura/sentani merupakan wilayah Transit dari beberapa kabupaten yang ada disekitarnya yang menyebabkan terjadinya beban kinerja bagi petugas yang ada.

2.1.2.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan yaitu subkegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dan subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, kedua subkegiatan ini terlaksana dengan realisasi 100% kinerja dan 100% realisasi keuangan.

2.1.2.4. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan yaitu, Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria, Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis dan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi dengan capaian kinerja mencapai target dan melebihi target sebagai berikut :

a. Sub kegiatan Mencapai Target Kinerja

Subkegiatan yang mencapai target kinerja 100% terdiri atas 12 sub kegiatan yaitu subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria dan subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis dengan realisasi keuangan masing-masing 98% dan 99%.

b. Sub Kegiatan Melebihi Target Kinerja

Sub kegiatan yang melebihi Target kinerja yaitu subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi dengan indikator Imunisasi dasar lengkap yang mencapai 151% dimana hal ini disebabkan tingginya jumlah sasaran bayi yang berasal dari luar wilayah kabupaten jayapura yang mengikuti imunisasi di kabupaten Jayapura

dimana hal ini juga menyebabkan bertambahnya beban kerja dan pembiayaan bagi tenaga kesehatan yang ada.

2.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan

Program kegiatan ini yang masuk dalam pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terdiri dari 2 kegiatan dan 3 subkegiatan dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

2.1.3.1. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dan subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dimana realisasi dari dua subkegiatan ini sudah cukup baik yaitu mencapai tingkat realisasi kinerja masing-masing 100% sedangkan realisasi keuangan masing-masing 97% dan 96%.

2.1.3.2. Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu subkegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota dengan capain kinerja dan keuangan mencapai 100%.

2.1.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pembiayaan pada Program kegiatan ini yaitu pada kegiatan Pemberian ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisional dan kegiatan Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri dengan masing-masing Sub kegiatan yaitu subkegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat Tradisional (UMOT) dan sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga dengan hasil capaian kinerja dan keuangan 100%.

2.1.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Advokasi Pemberdayaan , kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota dan kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan masing-masing yaitu subkegiatan Peningkatan

Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan realisasi kinerja dan keuangan 100%.

Total APBD kabupaten Jayapura pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp.1.510.563.114.987** dan dialokasikan untuk Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebesar **Rp 174.074.556.698,-** atau 11,52 % dari Total APBD yang terbagi dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai sebesar Rp 72.118.071.030 (41.42%) dan Belanja Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 101.956.485.668(58.57%) dan atau terbagi atas belanja urusan penunjang pemerintahan sebesar Rp. 72.511.798.507 dan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 101.562.758.286 (Sumber data: DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023). Anggaran tersebut naik signifikan dari tahun 2022 oleh karena penambahan anggaran DAK, DAU Spesifik Grant dan kebijakan Pembiayaan bantuan PBI bagi masyarakat kabupaten jayapura melalui DBH dan BHP Provinsi Papua.

Anggaran bersumber dari APBD kabupaten Jayapura sebesar Rp.169.040432.264 (97.11%) dan anggaran yang berasal dari APBD provinsi sebesar Rp. 5.034.124.425(2.89%) berupa BHP provinsi untuk membiayai program Kawasan tanpa Rokok(KTR). Adapun Gambaran Alokasi anggaran Kesehatan seperti Pada Tabel Berikut :

Tabel 2.2

Gambaran Anggaran berdasarkan belanja Sektor Kesehatan tahun 2023

Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan Daerah	
04.01.02	Retribusi Daerah	182.854.750
04.01.04	Lain Lain PAD yang sah	7.100.000.000
5	Belanja Daerah	
05.01	Belanja Operasi	
05.01.01	Belanja Pegawai	69.512.708.691
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	75.930.670.018
05.02	Belanja Modal	
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.581.678.084
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan bangunan	12.422.090.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.627.410.000

Sedangkan alokasi anggaran berdasarkan sumber pembiayaan dapat dilihat seperti pada table berikut :

Tabel 2.3.

Anggaran Sektor Kesehatan Berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	2	3	4
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBD KAB/KOTA	Rp169.040.432.264,00	97,11
	a. Belanja Langsung	Rp36.847.972.034,00	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp72.118.071.030,00	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp41.138.277.000,00	
	- DAK fisik	Rp8.399.423.000,00	
	1. Penguatan Sistem Kesehatan	Rp6.135.052.000,00	
	2. Pengendalian Penyakit	Rp502.998.000,00	
	3. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Rp1.761.373.000,00	
	- DAK non fisik	Rp32.738.854.000,00	
	1. BOK Kabupaten	Rp7.275.492.000,00	
	2. BOK Puskesmas	Rp25.463.362.000,00	
	3. Jampersal	Rp0,00	
	d. Otonomi Khusus (OTSUS)	Rp18.936.112.200,00	
	1. OTSUS (Block Grant)	Rp2.500.000.000,00	
	2. OTSUS (Spesific Grant)	Rp16.436.112.200,00	
2	APBD PROVINSI	Rp5.034.124.425,00	2,89
	a. Belanja Langsung		
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp5.034.124.425,00	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK		
3	APBN :	Rp0,00	0,00
	a. Dana Dekonsentrasi		
	b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi		
4	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) (sebutkan <i>project</i> dan sumber dananya)		0,00
5	SUMBER PEMERINTAH LAIN*		0,00
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		Rp174.074.556.689,00	
TOTAL APBD KAB/KOTA		Rp1.510.563.114.987,00	
% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA			11,5
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA		101.956.460.533	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa postur anggaran kesehatan sudah memenuhi syarat alokasi anggaran. Alokasi Anggaran dari DAK, DAU Spesifik Grant dan OTSUS menjadi sumber pembiayaan terbesar yang dikelola pada sektor kesehatan sehingga pada umumnya program dan kegiatan merupakan aktivitas pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Kementerian Kesehatan dan Provinsi Papua, sedangkan anggaran bersumber DAU/DID/DBH dan Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian dalam kebijakan untuk pembiayaan kegiatan inovasi daerah, manajemen pelayanan dan pembiayaan kebutuhan sarana kesehatan di kampung.

Pelaksanaan Program dan kegiatan wajib tersebut yang terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023, diperoleh realisasi program kegiatan berupa realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja.

1. Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berdasarkan APBD tahun 2023 adalah:

- a. Retribusi Jasa Umum berupa Jasa Pelayanan Kesehatan pada DPA induk sebesar Rp 50.000.000 dan DPA Perubahan sebesar Rp 182.854.750 dengan kenaikan 265,71 % oleh karena pelaksanaan JKN Non Kapitasi.
- b. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah berupa dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai DPA perubahan sebesar Rp 7.100.000.000

Dari target diatas, realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2023 adalah :

- a. Retribusi Jasa umum terealisasi 33.140.800 atau 18,12 %
- b. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah melalui dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 7.481.652.706 atau 105,37 %

2. Belanja

Dalam pelaksanaan belanja terhadap 5 program 18 kegiatan dan 83 sub kegiatan diperoleh realisasi fisik sebesar 99,82 % dengan realisasi keuangan sebesar 96,97 %. Dalam pelaksanaan belanja tahun 2023, dibagi atas dua bagian yaitu :

- a. Operasi dengan nilai sebesar Rp 141.254.045.988
- b. Belanja Pegawai realisasi sebesar Rp 69.495.908.691
- c. Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp 71.758.137.297
- d. Belanja Modal dengan nilai Rp 28.631.178.084 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 27.552.568.982

Dalam Pelaksanaan Belanja Pelayanan Kesehatan, penganggaran UPTD Puskesmas pada pelaksanaan upaya kesehatan perorangan (UKP) melalui dana Kapitasi JKN sebesar Rp 7.100.000.000 dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) melalui BOK Puskesmas sumber Dana DAK Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp 30.694.618.000 dengan total realisasi yang dilaksanakan di 22 Puskesmas sebesar Rp 31.697.420.297, secara rinci dalam pelaksanaan BOK Puskesmas terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

2.2.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi

pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 2.4 Skala Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Dalam mengukur Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kab Jayapura, mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Jayapura Tahun 2023-2026 serta Indikator SPM Kesehatan.

Dalam indikator RPJMD Kabupaten Jayapura, diperoleh beberapa hasil capaian melalui program/kegiatan yang terealisasi fisik sebesar 100 % tersebut. Indikator Umur Harapan Hidup yang menjadi indikator utama penilaian kinerja kesehatan, mengalami perubahan rumus perhitungan oleh BPS namun hasil UHH tersebut dapat disandingkan analisisnya dengan data IPM Kabupaten Jayapura.

Dalam Pelaksanaan pembangunan kesehatan, terdapat IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura antara lain Indeks Kesehatan, serta indeks pemenuhan SPM Kesehatan. Capaian di tahun 2022 dan 2023 antara lain :

- Indeks Kesehatan pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan dari BPS sudah mencapai Target yaitu 73,5 dari target Renstra yaitu 73,2
- Indeks Pemenuhan SPM Kesehatan mencapai predikat Tuntas Madya pada tahun 2023 yang sama juga hasilnya di tahun 2022 dengan target Tuntas Paripurna.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagai target pelayanan kesehatan. Pada tabel dibawah ini di gambarkan realisasinya yaitu :

Tabel. 2.5

Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2023

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH													
KABUPATEN JAYAPURA													
NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK 2023	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		%Kinerja 2023	CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT												
1	Angka usia harapan hidup		67,3	67,3	67,7	67,9	68	67,78		67,9	68	101,0401	
2	Prosentase stunting		16	30	29	28	27	11,23	26,9	28	27	90	
3	Prosentasi balita gizi kurang		<10	<10	<10	<10	<10	6		<10	<10	100	
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR												
1	Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan		100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100	
2	Angka kematian bayi (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP		17,6	21	19	17	15	19,90	6,7	17	15	100	
3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup		28	28	26	24	22	23,62	0	24	22	119	
4	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		11	21	19	17	15	19,23	6,4	17	15	57	
5	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		194	130	120	100	90	213,7	58,6	100	90	60,8	
6	Prosentasi Distrik memiliki satu Puskesmas		100	100	100	100	100	100		100	100	100	
7	Prosentase Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan		90	90	92	95	97	36,36	36,36	95	97	40	
8	Prosentase komplikasi Neonatal yang ditangani		57	57	70	80	90	57,37	4,3	80	90	100	
9	Prosentase komplikasi kebidanan yang ditangani		82	82	85	87	90	207	4,3	87	90	100	
10	Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan		93	100	100	100	100	99,44	25	100	100	100,0	
11	Prosentase Desa/Kelurahan Universal Immunization UCI		94,6	85	85	90	95	93,75	0	90	95	110	
12	Prosentase balita pnemonia yang ditangani		60	60	70	80	90	100	2,3	80	90	100	
13	Prosentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	103,78	6,16	100	100	104	
14	Prosentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Penderita diare yang ditangani		89	89	92	94	98	74,62	5	94	98	84	
16	Angka Insidens Malaria per 1000 penduduk		10,2	10,2	6,1	2	1	148,0	0	2	1	6,9	
17	Prosentase penderita HIV mendapat layanan kesehatan sesuai standard		100	100	100	100	100	86,07	11,63	100	100	100	

Pemerintah Kabupaten Jayapura

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK 2023	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		%Kinerja 2023	CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR												
18	Prosentase bayi mendapat layanan kesehatan sesuai standar (Cakupan kunjungan bayi)		92	92	95	97	100	97,6	21,43	97	100	106	
19	Prosentase Ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar (Cakupan kunjungan ibu hamil K4)		80	100	100	100	100	93,3	13,5	100	100	93,3	
20	Prosentase Ibu nifas mendapat layanan kesehatan sesuai standard		100	100	100	100	100	109,74	21,43	100	100	110	
21	Prosentase bayi usia 0-28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standar(caakupan KN3)		100	100	100	100	100	109,81	21,43	100	100	110	
22	Cakupan noeonatus dengan komplikasi yang ditangani		57	57	58	59	60	32,7	10	59	60	57	
23	Prosentase balita mendapat layanan kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	91,71	3.01	100	100	92	
24	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard		100	100	100	100	100	77	0	100	100	77	
25	Prosentase pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
26	Prosentase Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
27	Prosentase Usia Produktif (orang usia 15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai		100	100	100	100	100	88,86	12.82	100	100	88,9	
28	Prosentasi Lansia (orang berusia 60 Tahun atau lebih) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai		100	100	100	100	100	70,2	7.83	100	100	70,2	
29	Prosesntasi penderita Hipertensi usia >=15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai		100	100	100	100	100	70,43	15.74	100	100	70,43	
30	Prosentase penderita Diabetes Melitus usia >=15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard		100	100	100	100	100	78,82	7.83	100	100	78,82	
31	Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard		100	100	100	100	100	31,46	22.92	100	100	31,46	
32	Prosentase Kampung Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)		70	37	39	42	45	56,25	15	42	45	152	

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK 2023	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		%Kinerja 2023	CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)												
1	Prosentase Ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar (Cakupan kunjungan ibu hamil K4)	100		100	100	100	100	93,3	13.50	100	100	93,3	
2	Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	100		100	100	100	100	124,3	14.44		100	124,3	
3	Prosentase bayi usia 0-28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standar (cakupan KN3)	100		100	100	100	100	109,81	21.43	100	100	109,81	
4	Prosentase balita mendapat layanan kesehatan sesuai standar	100		100	100	100	100	79	3.01	100	100	79	
5	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100		100	100	100	100	77	0.00	100	100	77	
6	Prosentase Usia Produktif (orang usia 15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	100		100	100	100	100	89	2.92	100	100	89	
7	Prosentasi Lansia (orang berusia 60 Tahun atau lebih) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	100		100	100	100	100	70,2	12.82	100	100	70,2	
8	Prosesntasi penderita Hipertensi usia >=15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	100		100	100	100	100	70,43	15.74	100	100	70,43	
9	Prosentase penderita Diabetes Melitus usia >=15 tahun yang mendapat	100		100	100	100	100	76,82	7.83	100	100	76,82	
10	Prosentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100		100	100	100	100	23,5	22.92	100	100	23,5	
11	Prosentase orang terduga TBC yang amendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		100	100	100	100	80	5.16	100	100	80	
12	Prosentase penderita HIV mendapat layanan kesehatan sesuai standard	100		100	100	100	100	146	11.63	100	100	146	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada tabel diatas terdiri dari dua aspek yaitu Aspek Kesehatan Masyarakat dengan 3 indikator dan Aspek Layanan Urusan Wajib Dasar dengan 32 indikator dengan hasil kinerja berdasarkan target skala penilaian Kinerja sebagai berikut yaitu:

A. Aspek Kesehatan Masyarakat

Aspek Kesehatan masyarakat terdiri atas 3 indikator yaitu Angka Usia Harapan Hidup, Prosentase Stunting dan Prosentase balita gizi kurang .Ketiga

indikator ini dapat terealisasi dengan sangat baik atau mencapai target bahkan melebihi dari target nasional yaitu target Nasional untuk angka harapan hidup adalah 67,3 tahun dan terealisasi menjadi 67,78 tahun, prosentase Stunting dengan target Nasional 16% pada tahun 2023 terealisasi menjadi 11,23% serta prosentase balita gizi kurang dari target <10 balita terealisasi menjadi 6 balita.

B. Aspek Layanan Urusan Wajib Dasar

Aspek Layanan Urusan wajib terdiri dari 32 indikator dengan capaian realisasi kinerja sebagai berikut :

- a. Indikator yang mendapat penilaian kinerja sangat baik yaitu dengan nilai persentase kinerja $\geq 91\%$ adalah sebanyak 20 indikator atau 62,5% dari total indikator
- b. Indikator yang mendapat penilaian Kinerja Tinggi yaitu dengan nilai presentase kinerja 75,1-90,0% adalah sebanyak 5 indikator atau 15,6 % dari total indicator.
- c. Indikator yang mendapat penilaian sedang yaitu dengan nilai prosentase kinerja 65,1-75,0 adalah sebanyak 2 indikator atau 6,5 % dari total indikator.
- d. Indikator yang mendapat penilaian rendah nengan nilai prosentase kinerja 50,1-60,0 adalah sebanyak 2 indikator atau 6,5 % dari total indikator.
- e. Indikator yang mendapat penilaian sangat rendah adalah 3 Indikator atau 9,37 % dari total indikator.

2.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jika dianalisis hasil kinerja Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 yang memuat pelaksanaan SPM Kesehatan dengan target kinerja untuk seluruh indicator (12 Indikator) adalah 100 % maka terdapat tiga indikator yang melebihi target 100% yaitu Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan, Prosentase bayi usia 0-28 hari mendapat layanan kesehatan sesuai standar(caakupan KN3), dan Prosentase penderita HIV mendapat layanan kesehatan sesuai standard, 1 indikator yang sangat baik yaitu Prosentase Ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar (Cakupan kunjungan ibu hamil K4) dengan realisasi 93,3. Selanjutnya terdapat 5 indikator dengan penilaian prosentase kinerja tinggi yaitu Prosentase balita mendapat layanan kesehatan sesuai standar (79%),Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard (77%), Prosentase Usia Produktif (orang usia 15-59 tahun) yang mendapat pelayanan

kesehatan sesuai standar (89%), Prosentase penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun yang mendapat (76%) dan Prosentase orang terduga TBC yang amendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (80%) juga terdapat 2 indikator dengan kategori penilaian sedang yaitu indikator Prosentasi Lansia (orang berusia 60 Tahun atau lebih) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (70,2%), Prosentasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (76,8%) serta terdapat satu indikator dengan nilai realisasi sangat rendah yaitu indikator Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (23,5%). Dalam penilaian nasional dengan capaian total SPM Kesehatan adalah 80 % maka masuk dalam predikat **Tuntas Madya**.

Hal ini terjadi akibat beberapa pendekatan metodologi layanan yang belum tepat dan maksimal serta masih ada beberapa wilayah yang belum dapat dijangkau dengan baik akibat penyediaan sarana dan prasarana di 144 kampung/kelurahan baru tercapai 80%.

2.2.4. Analisis Permasalahan

Kendala dalam pelaksanaan IKK dan SPM Kesehatan di Kabupaten Jayapura antara lain:

1. Secara umum, 12 SPM Kesehatan dilaksanakan kepada masyarakat walaupun belum mencapai 100 % untuk seluruh indikator atau TUNTAS MADYA yaitu 80%, namun beberapa indikator mengalami peningkatan dari terget dengan kinerja tinggi dan sangat baik atau diatas 75,1 %
2. Pencapaian IKK dan SPM yang melebihi target disebabkan adanya layanan luar wilayah serta kemungkinan rendahnya target yang ditetapkan
3. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jayapura menyebabkan kebijakan-kebijakan pembatasan aktivitas di masyarakat, juga mempengaruhi pelayanan yang dapat diberikan. Sebagaimana ditetapkan dalam berbagai pedoman pelayanan bahwa pelaksanaan janji temu dan penggunaan media komunikasi menjadi strategi untuk pelayanan Kesehatan. Sehingga keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa kinerja tidak tercapai seperti layanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, dan pelayanan balita.
4. Pembatasan petugas Kesehatan, terutama yang beresiko, dalam bekerja di sarana Kesehatan. Hal ini terkait penanganan pandemic COVID-19 di Kabupaten Jayapura sehingga ketersediaan SDM Kesehatan terbatas dalam pelaksanaan layanan SPM.

5. Beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target atau zona kuning dan merah disebabkan adanya perubahan standar indikator yang baru secara khusus pada indikator Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard.
6. Kemandirian Masyarakat masih kurang dalam membangun kesehatan diri dan keluarga dibuktikan juga dengan rasio posyandu per balita di masyarakat adalah 1:48 orang yang seharusnya 1:20 balita.
7. 80 % dari 144 Kampung/kelurahan di Kabupaten jayapura sudah memiliki sarana kesehatan sehingga masih ada 15-20 % kampung belum memiliki akses ke sarana kesehatan, dengan catatan bahwa tidak semua kampung harus memiliki sarana kesehatan karena jarak yang berdekatan dengan sarana kesehatan di kampung lainnya.
8. Dari 22 Puskesmas di Kabupaten jayapura, 8 Puskesmas yang sudah memiliki standard SDM Kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2019 yaitu minimal sembilan jenis tenaga kesehatan. Sedangkan 14 Puskesmas lainnya belum sesuai standard dengan rata-rata pada ketiadaan dokter gigi dan Apoteker.
9. Pembiayaan SPM Kesehatan belum maksimal oleh karena Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengelola anggaran yang didominasi sumber anggaran DAK, DAU Spesifik Grand dan OTSUS yang telah diatur menggunakan Petunjuk Teknis sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Tahun 2023, postur anggaran DAK/OTSUS mencapai 73 % (Diluar Belanja Gaji PNS) walaupun ada peningkatan pada sumber anggaran DAU/DID/DBH oleh karena refocussing anggaran, namun petunjuk teknis penggunaan anggaran tersebut pada penanganan covid-19. Akibatnya juga pada manajemen pelaksanaan SPM Kesehatan.

2.2.5. Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala di atas beberapa solusi dapat diambil yaitu:

1. Kegiatan lebih banyak di danai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Integrasi pelayanan yang belum mencapai target dengan Program PIS-PK
3. Penguatan sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan
4. Pendekatan pembangunan kesehatan secara afirmasi agar kemandirian masyarakat bisaditingkatkan.

5. Penguatan logistik Kesehatan, terutama dalam mendukung pelaksanaan SPM Kesehatan.
6. Melibatkan lintas sector di Distrik dan kampung dengan lebih kuat/solid agar Indikator SPM Kesehatan dapat ditunjang dengan kapasitas dan modal yang ada di kampung melalui dana ADK dan ADD.
7. Pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan SPM Kesehatan di fasilitas kesehatan

2.2.6. Tindak Lanjut

Dalam mereduksi permasalahan dan memperkuat solusi yang diambil, maka tidak lanjut jangka pendek adalah perhitungan pembiayaan/costing SPM yang lebih efisien dan efektif dalam penetapan anggaran, penguatan pelaksanaan PIS-PK sebagai data dasar kesehatan dan melibatkan lintas sektor, membangun pengawasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan layanan kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Selain itu dengan adanya sensus penduduk 2020 maka jumlah penduduk sebagai target pelayanan kesehatan tidak lagi menjadi masalah dalam pelaksanaan manajemen penerapan SPM Kesehatan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tidak adanya Sinkronisasi perencanaan dalam menentukan target dan indikator antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten merupakan salah satu penghambat tingkat keberhasilan dalam penyusunan rencana pembangunan kesehatan.

Dalam pelaksanaan program kesehatan, terdapat target-target Nasional dan Provinsi Papua yang menjadi target utama sebagaimana telah disampaikan pada Bab II dengan penjelasan sebagaimana termuat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.6
Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Jayapura Tahun 2023	Sasaran pada Renstra Dinkes Provinsi Papua	Sasaran pada Renstra Kemenkes RI
1.	Angka Kematian Ibu dan Bayi	Angka Kematian Ibu sebesar <202,42/100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi sebesar <19,9/1000 Kelahiran Hidup	Target Capaian AKI tahun 2023 adalah 200/100.000 KH sedangkan AKB sebesar 20/1000 KH	Target Capaian AKI Nasional 2024 adalah 183/100.000 KH sedangkan AKB adalah 24/1000 KH
2.	Stunting	Capaian indikator Stunting pada tahun 2022 adalah 11,2 %	Target Capaian Stunting tahun 2023 adalah 23 %	Target Capaian Stunting pada tahun 2024 adalah 14 %.
3	Imunisasi Dasar Lengkap	Capakain Indikator Imunisasi Dasar lengkap tahun 2023 adalah 100 %	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap tahun 2023 adalah 95%	Target Capaian Imunisasi Dasar Lengkap Nasional tahun 2024 adalah 100 %

Dari Data diatas tergambarakan bahwa seluruh indikator pelayanan RPJMD 2023-2026 pada dinas kesehatan kabupaten jayapura yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 telah diselaraskan dengan pemerintah pusat maupun Provinsi , baik indikator sasaaran, indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci , dengan hasil yang menunjukkan sudah mencapai target tercapai.

Tabel 2.7
Analisis Kesesuaian Target dan Realisasi Tahun 2023 berdasarkan
Masukan DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2022

NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Menganalisis program kesehatan untuk menunjang capaian SPM kesehatan	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota</p>	19 Distrik	100 %	<p>1 Seluruh SPM Kesehatan telah dilaksanakan tahun 2021</p> <p>2 Surat Edaran pelaksanaan UKP dan UKM di masa pandemi Covid-19 Penguatan metode pelaksanaan layanan SPM di masa pandemi Covid-19 Refocussing anggaran yang proporsional antara penanganan covid-19 dan SPM Kesehatan</p>	<p>1 Mengintensifkan Posyandu sehingga Capaian Layanan Bayi dan Balita mengalami peningkatan</p> <p>2 Memaksimalkan kader posyandu dalam tugas pelayanan</p>
2	Penanganan Covid-19	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota</p>	19 Distrik	100 %		
NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

3	Meningkatkan Angka Harapan Hidup	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	21 Puskesmas	67,78 Tahun	a. Menekan Angka Kematian Ibu b. Menekan Angka Kematian Bayi dan Balita c. Memperkuat layanan kesehatan sesuai standard bagi usia produktif d. Melaksanakan program posbindu dan poslansia	1 Dinas Kesehatan lebih intens melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi setiap kelahiran
4	Menekan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	19 Distrik	AKI 167,45 /100.000 KH AKB 2,34/ 1000 KH AKABA 2,34/ 1000 KH	a. Melaksanakan Layanan Rumah Tunggu Kelahiran b. Puskesmas non rawat inap mampu layanan rawat persalinan Menyediakan c. pembiayaan rujukan Menajalankan Review d. Maternal Perinatal Menyediakan sarpras dan alat kesehatan e. layanan KIA Memperkuat kapasitas bidan kampung Pemenuhan bidan di f. sarana kesehatan kampung	
NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

5	Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 distrik	20%	Melaksanakan kegiatan penanggulangan Stunting baik dari sisi layanan, manajemen program serta koordinasi lintas sektor	
6	Penguatan Imunisasi Dasar Lengkap melalui Kampung UCI	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	81 %	1 Melaksanakan Posyandu 2 Sweeping Imunisasi pada daerah-daerah sulit dijangkau 3 Kunjungan Rumah untuk cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	1 posyandu sebagai pusat kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, tersistem serta kontinyu atau berkesinambungan secara periodik
7	Eliminasi Malaria	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	19 Distrik	API 177/1000 Penduduk	1 Memperluas Kampung Siaga malaria 2 Pemberdayaan Kader Kampung 3 Penguatan pencegahan melalui Kelambu 4 Penguatan lintas sektor 5 Penemuan kasus dan Pelaksanaan pengobatan dengan efektif	1 Memaksimalkan kader posyandu dalam tugas pelayanan

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura

A. Permasalahan Kesehatan Masyarakat

Dari analisis masalah terhadap berbagai sector pembangunan, dari sector kesehatan dapat disimpulkan masalah pokoknya yaitu belum optimalnya Kualitas pelayanan Kesehatan oleh karena beberapa hal yaitu :

1. Masih terbatas dan rendahnya kualitas tenaga para medis dan tenaga dokter.
2. Keterbatasan sarana transportasi dalam mendukung pelayanan kesehatan.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.
 4. Belum optimalnya pemenuhan gizi sesuai standar untuk pencegahan *stunting*.
 5. Meningkatnya penderita diabetes, hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya termasuk meningkatnya kasus orang dengan gangguan kejiwaan
 6. Disparitas Kualitas Lingkungan hidup di beberapa wilayah
 7. Tingginya Penyakit menular endemis
 8. Dampak Pandemi Covid-19 Sejak tahun 2020
- B. Permasalahan Urusan Wajib Dasar
1. Angka harapan hidup kabupaten Jayapura Tahun 2023 mencapai 67.78 tahun, telah melewati angka harapan hidup Provinsi Papua tahun 2023, yakni 66.44 tahun, namun masih jauh dari capaian ideal yakni 85 tahun.
 2. Masalah penyakit infeksi belum dapat diatasi namun masalah baru sudah harus segera mendapat perhatian, yaitu penyakit degeneratif dan penyakit kronis (hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner dan sebagainya) yang frekuensinya semakin bertambah, menimbulkan beban ganda dan berimplikasi pada perencanaan di bidang kesehatan.
 3. Penyakit HIV/AIDS pada tingkat yang mengkhawatirkan yang memberi dampak negatif di bidang kesehatan, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan.
 4. Sarana/fasilitas kesehatan yang masih terbatas untuk menjangkau luasnya wilayah serta kesulitan geografis. Sampai akhir tahun 2023 tersedia dua rumah sakit umum milik pemerintah , 22 Puskesmas, 70 Puskesmas Pembantu (Pustu), 17 Polindes, 5 Pusling Air dan 33 kendaraan Pusling Darat dengan rincian 26 kendaraan baik dan 7 kendaraan rusak sedang-berat, dan memiliki 3 kendaraan PSC 119 serta 1 kendaraan ambulance jenazah yang dikelola Distrik Demta. Rasio posyandu/balita 1:48; rasio dokter PNS terhadap penduduk 1:167,5; rasio puskesmas terhadap wilayah 1:1 distrik.
 5. Sarana Prasarana dan Alat kesehatan pada beberapa bidang layanan di Rumah Sakit Umum Daerah masih sangat terbatas.
 6. Masih Terbatasnya Tenaga Dokter Spesialis di RSUD dan Puskesmas mampu PONE
 7. Sebanyak 30.6 % dari 144 Kampung/Kelurahan belum mempunyai tempat

pembuangan akhir tinja hanya menggunakan kolam/sawah, sungai, lubang tanah, dan lainnya sebagai tempat buang air besar. Sekitar 45.32 % rumah tangga di Kabupaten Jayapura beresiko terkena pencemaran sumber air minum.

8. Tenaga kesehatan belum merata terdistribusi sampai ke tingkat kampung.
 9. Masih minimnya fasilitas penunjang pelayanan posyandu di beberapa kampung.
 10. Belum meratanya sarana prasarana dan alat kesehatan kesehatan di setiap kampung.
 11. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas 24 jam di wilayah-wilayah yang jangkauan terbilang cukup jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 12. Masih adanya kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas.
 13. Masih tingginya kasus kematian bayi umur 0 sampai kurang dari 1 tahun
- C. Dampak Terhadap capaian program Nasional dan pembangunan Daerah
1. Target Nasional belum tercapai akibat adanya beberapa indikator yang masih dibawah standar
 2. Dukungan pencapaian indikator daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia belum maksimal
 3. Akses Layanan Kesehatan oleh Masyarakat belum optimal yaitu pada angka 78 % dari total 144 Kampung/Kelurahan
 4. Keterbatasan SDM Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas pada Puskesmas Kriteria Pedesaan dan Sangat terpencil serta distribusi SDM Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan belum merata.
 5. Peralatan Puskesmas masih terbatas dalam melakukan layanan-layanan kesehatan, terutama layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Unit Gawat Darurat, dan Upaya-upaya Kesehatan Masyarakat.
 6. Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 4 Puskesmas terbatas dan belum mencapai standard menurut Permenkes No. 43 tahun 2019
 7. Tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang prima semakin tinggi
 8. Beban ganda pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular.
 9. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020

D. Rekomendasi dan catatan

1. Tersedia Puskesmas dan jaringannya diseluruh Distrik di Kabupaten Jayapura yaitu 19 Distrik dengan 22 Puskesmas, 70 Puskesmas pembantu dan 17 Polindes
2. Petunjuk Teknis penggunaan dana Kapitasi JKN pada FKTP mendukung pemenuhan sarana dan prasarana FKTP/Puskesmas yang disesuaikan dengan anggaran yang diterima
3. Kebijakan Pemenuhan SDM Kesehatan melalui penyediaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberbagai jenjang Pemerintahan
4. Anggaran Dana Desa/Kampung dapat mendukung pelayanan kesehatan di kampung-kampung.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Pada rancangan awal RKPD yang merupakan hasil sinkronisasi perencanaan awal Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten. Dalam proses tersebut terdapat beberapa analisis dan perubahan didalam rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2023 tersebut antara lain:

- a. Dukungan terhadap strategi penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 paska pandemi covid-19
- b. Rekonstruksi bangunan kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta penguatan prasarana dan alat kesehatannya.
- c. Penyediaan Rumah dinas bagi petugas kesehatan
- d. Pelaksanaan Permenkes RI No. 4 tahun 2019 tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang Kesehatan yang memiliki 12 indikator dengan beberapa sektor penguatan yaitu pada Program KIA, Penanggulangan Penyakit Menular, penanggulangan Penyakit Tidak menular maka arahan Rencana Kerja 2022 telah diarahkan untuk mengakomodir pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan pada tahun anggaran 2022.
- e. Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) dengan salah satu pilar STOP BABS menjadi sasaran kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan guna menurunkan angka kesakitan akibat Lingkungan yang tidak sehat.
- f. Kegiatan Monitoring terpadu ke fasilitas layanan kesehatan. Kegiatan ini menjadi tanggapan atas hasil survei meter bekerjasama dengan USAID-RTI, dalam mensurvei layanan kesehatan di masyarakat. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan monitoring terpadu

dari seluruh bidang program kesehatan ke distrik dan kampung dalam kaitannya layanan teknis dan non-teknis kesehatan sehingga mendapat data dan masalah yang terjadi secara *updated* dan memberikan masukan perencanaan yang baik bagi Fasyankes dan Dinas Kesehatan Kab. Jayapura

- g. Penguatan peran serta masyarakat melalui penguatan Koordinasi dengan Badan Peduli Kesehatan Kab Jayapura sampai tingkat distrik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang memerlukan peran serta masyarakat baik serta optimalisasi UKBM seperti Posyandu, Posbindu dan Poslansia
- h. Pembangunan sarana Fasyankes, akan dikembangkan dalam pengembangan sarana serta prasarana Puskesmas non perawatan agar dapat melayani rawat persalinan serta penguatan prasarana puskesmas keliling sesuai dengan permenkes no.43 tahun 2019 dengan memperhatikan ketersediaan tanah oleh masyarakat.
- i. Pelaksanaan inovasi penanggulangan Malaria melalui Program Kampung Siaga Malaria dan inovasi pelayanan kesehatan lainnya.
- j. Pelaksanaan Rumah Tunggu Kelahiran Rumah sakit akan menjadi salah satu pendorong pelayanan kesehatan ibu untuk melahirkan di sarana kesehatan serta pelayanan Ibu dan bayi resiko tinggi untuk dapat dipantau dan mengakses Rumah sakit dengan lebih mudah.
- k. Penguatan Puskesmas dalam melaksanakan tugas preventif dan promotif menggunakan dana DAK Non Fisik/BOK melalui pendampingan pelaksanaan kegiatan.
- l. Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura sesuai peraturan bupati yang ditetapkan dengan target mengalami penurunan 1 %/tahun
- m. Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat untuk pencapaian universal Health Coverage (UHC) dalam pengentasan kemiskinan ekstrim.
- n. Pelayanan perlindungan pangan dan bahan kimia yang beredar di masyarakat serta dukungan atas tumbuhnya UMKM yang sesuai dengan standard melalui kerjasama bersama BPOM.

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Secara khusus review terhadap RKPD Kabupaten Jayapura tahun 2023 dapat tergambar melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 (T.C 31) Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Kab. Jayapura

Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sentani	Masukan	Dana	126.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sentani	Masukan	Dana	126.180.000	
			Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan	1			Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan	1	
			Hasil	Prosentase Peningkatan Manajemen Kesehatan terpenuhi	40			Hasil	Prosentase Peningkatan Manajemen Kesehatan terpenuhi	40	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SENTANI	Masukan	Dana	31.159.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SENTANI	Masukan	Dana	31.159.000	
			Keluaran	Jumlah dokumen laporan wajib tahunan	6 laporan			Keluaran	Jumlah dokumen laporan wajib tahunan	6 laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sentani	Masukan	Dana	94.276.675	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sentani	Masukan	Dana	94.276.675	
			Keluaran	Jumlah Rapat kerja Kesehatan	1 kali			Keluaran	Jumlah Rapat kerja Kesehatan	1 kali	
			Hasil	Prosentase Peningkatan Manajemen Kesehatan terpenuhi	40			Hasil	Prosentase Peningkatan Manajemen Kesehatan terpenuhi	40	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	SENTANI	Masukan	Dana	28.068.631.977	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	SENTANI	Masukan	Dana	46.834.073.158	Penyesuaian Gaji CPNS dan PNS serta TPS
			Keluaran	Jumlah PNS mendapat tunjangan kelangkaan profesi	21 orang			Keluaran	Jumlah PNS mendapat tunjangan kelangkaan profesi	21 orang	
			Keluaran	Jumlah Non PNS mendapat tunjangan kelangkaan profesi	20 orang			Keluaran	Jumlah Non PNS mendapat tunjangan kelangkaan profesi	20 orang	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	SENTANI	Masukan	Dana	633.780.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	SENTANI	Masukan	Dana	633.780.000	
			Keluaran	Jumlah ASN mendapat honor admin keuangan	32 orang			Keluaran	Jumlah ASN mendapat honor admin keuangan	32 orang	
			Keluaran	Jumlah PNS pensiun/wafat dalam tugas selama 12 bulan yang dilaksanakan proses administrasi	3 orang			Keluaran	Jumlah PNS pensiun/wafat dalam tugas selama 12 bulan yang dilaksanakan proses administrasi	3 orang	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Tugas dan Fungsi	SENTANI	Masukan	Dana	147.998.000	Tugas dan Fungsi	SENTANI	Masukan	Dana	147.998.000	
			Keluaran	Jumlah PNS mengikuti Uji kompetensi	40 orang			Keluaran	Jumlah PNS mengikuti Uji kompetensi	40 orang	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60			Hasil	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SENTANI	Masukan	Dana	67.230.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SENTANI	Masukan	Dana	67.230.000	
			Keluaran	Jumlah puskesmas dilaksanakan BIMTEK kepegawaian	18 puskesmas			Keluaran	Jumlah puskesmas dilaksanakan BIMTEK kepegawaian	18 puskesmas	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40			Hasil	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Masukan	Dana	2.782.440	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Masukan	Dana	2.782.440	
			Keluaran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis			Keluaran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SENTANI	Masukan	Dana	24.021.260	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SENTANI	Masukan	Dana	24.171.260	
			Keluaran	Jumlah jenis peralatan kebersihan kantor disediakan	21 Jenis			Keluaran	Jumlah jenis peralatan kebersihan kantor disediakan	21 Jenis	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	6			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	6	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SENTANI	Masukan	Dana	154.330.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SENTANI	Masukan	Dana	154.330.000	
			Keluaran	Jumlah BBM operasional kendaraan operasional	16.149 liter			Keluaran	Jumlah BBM operasional kendaraan operasional	16.149 liter	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SENTANI	Masukan	Dana	32.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SENTANI	Masukan	Dana	32.600.000	
			Keluaran	Jumlah lembar penggandaan dokumen kantor	50.892 lbr			Keluaran	Jumlah lembar penggandaan dokumen kantor	50.892 lbr	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	6			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	6	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SENTANI	Masukan	Dana	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SENTANI	Masukan	Dana	4.800.000	
			Keluaran	Jumlah langganan sumber bacaan/informasi	2 bhn bacaan			Keluaran	Jumlah langganan sumber bacaan/informasi	2 bhn bacaan	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SENTANI	Masukan	Dana	40.043.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SENTANI	Masukan	Dana	40.043.500	
			Keluaran	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman	8 jenis			Keluaran	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman	8 jenis	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SENTANI	Masukan	Dana	258.040.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SENTANI	Masukan	Dana	258.040.000,00	
			Keluaran	Jumlah paket Biaya Perjalanan dinas aparaturn luar daerah	10 kali			Keluaran	Jumlah paket Biaya Perjalanan dinas aparaturn luar daerah	10 kali	
			Keluaran	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	168 Orang/Hari			Keluaran	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	168 Orang/Hari	
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	10	

Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	SENTANI	masuk	Dana	450.000	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	SENTANI	masuk	Dana	450.000	
			Keluaran	Jumlah dokumen surat dikirim	10 paket surat			Keluaran	Jumlah dokumen surat dikirim	10 paket surat	-
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	2			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	2	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	SENTANI	Masukan	Dana	39.120.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	SENTANI	Masukan	Dana	39.120.000	
			Keluaran	Jumlah layanan internet dibayarkan	2 layanan			Keluaran	Jumlah layanan internet dibayarkan	2 layanan	-
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	2			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	2	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	SENTANI	Masukan	Dana	7.870.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	SENTANI	Masukan	Dana	7.870.000	
			Keluaran	Jumlah peralatan kantor dapat beroperasi baik	11 unit			Keluaran	Jumlah peralatan kantor dapat beroperasi baik	11 unit	-
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	2			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	2	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SENTANI	Masukan	Dana	363.810.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SENTANI	Masukan	Dana	363.810.000	
			Keluaran	Jumlah kendaraan operasional dapat dibayarkan	7 unit			Keluaran	Jumlah kendaraan operasional dapat dibayarkan	7 unit	-
			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4			Hasil	Prosentase pemenuhan Administrasi Perkantoran	4	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SENTANI	Masukan	Dana	19.390.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SENTANI	Masukan	Dana	19.390.000	
			Keluaran	Jumlah peralatan gedung kantor dapat beroperasi baik	21 unit			Keluaran	Jumlah peralatan gedung kantor dapat beroperasi baik	21 unit	-
			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur terpenuhi	20			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur terpenuhi	20	-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Rasio sarana kesehatan per 1000 penduduk	0,87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Rasio sarana kesehatan per 1000 penduduk	0,87	-
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP					-
	Pembangunan Puskesmas	Sentani (Yahini)	Masukan	Dana	12.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	Sentani (Yahini)	Masukan	Dana	12.000.000.000	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas baru dibangun	1			Keluaran	Jumlah Puskesmas baru dibangun	1	-
			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi	50			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi	50	-
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Malili	Masukan	Dana	-	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Malili	Masukan	Dana	985.000.000	Pemenuhan sarana kesehatan daerah sangat sulit yang tidak dapat terakomodir melalui OTSUS
			Keluaran	Jumlah Puskesmas Pembantu dibangun	1			Keluaran	Jumlah Puskesmas Pembantu dibangun	1	-
			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi				Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi		-
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Uhorum Guay, Ravenara dan Gresi Selatan	Masukan	Dana DAK	2.150.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Uhorum Guay, Ravenara dan Gresi Selatan	Masukan	Dana DAK	2.150.000.000	
			Keluaran	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang tersedia	4 Unit			Keluaran	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang tersedia	4 Unit	-
			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi	20			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi	20	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Yokari	Masukan	Dana	2.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Yokari	Masukan	Dana	2.015.000.000	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan penambanahan Ruang	1			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan penambanahan Ruang	1	-
			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi				Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi		-
		Doyo Baru	Masukan	Dana	700.000.000		Doyo Baru	Masukan	Dana	700.000.000	
	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan		Keluaran	Jumlah peningkatan sarana puskesmas	1	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan		Keluaran	Jumlah peningkatan sarana puskesmas	1	-
			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi				Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi		-
			Masukan	Dana DAK	5.561.093.000			Masukan	Dana DAK	5.561.093.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Airu, Paga, Nimboran, Nimbokrang, Sentani, Sentani Barat, Gresi Selatan, Kureh, Walbu	Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat peningkatan sarana dan prasarana	10	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan		Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat peningkatan sarana dan prasarana	10	-
		Doyo Baru, Demta dan Hulo Atas	Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat peningkatan prasarana	2			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat peningkatan prasarana	2	-
			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi	20			Hasil	Prosentase Peningkatan Sarana dan prasarana Puskesmas terpenuhi	20	-
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Masukan	Dana DAK	767.153.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Masukan	Dana DAK	767.153.000	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat Alat Kesehatan				Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat Alat Kesehatan		-
			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat Alat Kesehatan				Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mendapat Alat Kesehatan		-
			Calupan Ketersediaan Obat	>90				Calupan Ketersediaan Obat	>90		-
		SENTANI	Masukan	Dana	1.863.397.208		SENTANI	Masukan	Dana	1.863.397.208	
	Pengadaan Obat dan Vaksin		Keluaran	Jumlah jenis Obat dan BHP yang tersedia	110	Pengadaan Obat dan Vaksin		Keluaran	Jumlah jenis Obat dan BHP yang tersedia	110	-
		SENTANI	Masukan	Dana			SENTANI	Masukan	Dana		-
			Keluaran	Jumlah fasyankes yang didistribusikan obat dan BHP oleh IFK	32			Keluaran	Jumlah fasyankes yang didistribusikan obat dan BHP oleh IFK	32	-
			Hasil	Prosentase Ketersediaan Obat terpenuhi	40			Hasil	Prosentase Ketersediaan Obat terpenuhi	40	-
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Masukan	Dana	1.350.909.962	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Masukan	Dana	1.350.909.962	
			Keluaran	Jumlah fasyankes yang didistribusikan BHP oleh IFK				Keluaran	Jumlah fasyankes yang didistribusikan BHP oleh IFK		-
			Hasil	Prosentase Ketersediaan BHP di Puskesmas				Hasil	Prosentase Ketersediaan BHP di Puskesmas		-
	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan		Masukan	Dana DAK	19.560.000	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik, fasilitas pelayanan kesehatan		Masukan	Dana DAK	19.560.000	
			Keluaran	Jumlah Alat yang di kalibrasi	104 buah			Keluaran	Jumlah Alat yang di kalibrasi	104 buah	-
			Hasil					Hasil			-

Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Usia Harapan Hidup	67,7		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Usia Harapan Hidup	67,7			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	519.487.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	519.487.000		
			Keluaran	Jumlah Bidan yang mendapat peningkatan kapasitas layanan teknis	135 orang	-		Keluaran	Jumlah Bidan yang mendapat peningkatan kapasitas layanan teknis	135 orang	-	
			Hasil	Prosentase Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	50	-		Hasil	Prosentase Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	50	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sentani	Masukan	Dana		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sentani	Masukan	Dana	-	
			Keluaran	Jumlah Pertemuan AMP yang dilaksanakan	4	-		Keluaran	Jumlah Pertemuan AMP yang dilaksanakan	4	-	
			Keluaran	Jumlah Klaim Jampersal	1646 ibu	1.123.000.000		Keluaran	Jumlah Klaim Jampersal	1646 ibu	1.123.000.000	
			Hasil	Prosentase Pelaksanaan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan terpenuhi	100	-		Hasil	Prosentase Pelaksanaan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan terpenuhi	100	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	100.000.000		
			Keluaran	Prosentase Neonatus Risti tertangani	58	-		Keluaran	Prosentase Neonatus Risti tertangani	58	-	
			Hasil	Prosentase Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	50	-		Hasil	Prosentase Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	50	-	
				cakupan pelayanan anak balita	92	-			cakupan pelayanan anak balita	92	-	
			Masukan		88.659.000			Masukan		88.659.000		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Keluaran	Jumlah Balita yang mendapat pelayanan kesehatan	80 orang	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Keluaran	Jumlah Balita yang mendapat pelayanan kesehatan	80 orang	-
			Hasil	Prosentase Peni ngkatan Layanan kesehatan Anak balita	100	-			Hasil	Prosentase Peni ngkatan Layanan kesehatan Anak balita	100	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Masukan	Dana	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Masukan	Dana	50.000.000		
			Keluaran			-		Keluaran			-	
			Hasil		15	-		Hasil		15	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	171.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	171.300.000		
			Keluaran	Jumlah Poslansia yang aktif	18			Keluaran	Jumlah Poslansia yang aktif	18	-	
			Hasil	Prosentase Peni ngkatan Layanan kesehatan Lansia	100	-		Hasil	Prosentase Peni ngkatan Layanan kesehatan Lansia	100	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Wil Pembangunan	Masukan		50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Wil Pembangunan	Masukan		50.000.000		
			Keluaran	Jumlah Poslansia distrik yang aktif	10	-		Keluaran	Jumlah Poslansia distrik yang aktif	10	-	
			Hasil	Prosentase Peni ngkatan Layanan kesehatan Lansia	100	-		Hasil	Prosentase Peni ngkatan Layanan kesehatan Lansia	100	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	128.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	128.000.000		
			Keluaran	Jumlah puskesmas melaksanakan layanan OGI	10			Keluaran	Jumlah puskesmas melaksanakan layanan OGI	10		
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	4			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	4		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Masukan	Dana	350.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Masukan	Dana	350.000.000		
			Keluaran	Jumlah Suspek TB ditemukan dan diobati	606			Keluaran	Jumlah Suspek TB ditemukan dan diobati	606		
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	20			Hasil	Prosentase Pemenuhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	20		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	300.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	300.000.000		
			Keluaran	Jumlah Kasus HIV/AIDS yang tertangani	2.550			Keluaran	Jumlah Kasus HIV/AIDS yang tertangani	2.550		
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	6			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	6		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	832.928.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	832.928.000		
			Keluaran	stunting	10				Keluaran	stunting	10	
			Keluaran	Jumlah Petugas Gigi yang ditingkatkan kapasitas pelayanan program Kesehatan	80				Keluaran	Jumlah Petugas Gigi yang ditingkatkan kapasitas pelayanan program Kesehatan	80	
			Hasil	Prosentase Pelaksanaan Perbaikan Gigi Masyarakat terpenuhi	50				Hasil	Prosentase Pelaksanaan Perbaikan Gigi Masyarakat terpenuhi	50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	97.475.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	97.475.000		
			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan K3	10			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan K3	10		
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	2			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	2		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Masukan	Dana	362.322.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Masukan	Dana	362.322.500		
			Keluaran	Jumlah Kampung STBM/SBS	40				Keluaran	Jumlah Kampung STBM/SBS	40	
			Keluaran	Jumlah Sampel Air Bersih	150 sampel				Keluaran	Jumlah Sampel Air Bersih	150 sampel	
				Jumlah Sekolah Sehat	4 sekolah					Jumlah Sekolah Sehat	4 sekolah	
			Hasil	Prosentase Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan	100				Hasil	Prosentase Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan	100	

Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	74.097.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	74.097.000	
			Keluaran	Jumlah Jenis sarana Media Promkes	4			Keluaran	Jumlah Jenis sarana Media Promkes	4	
			Keluaran	Jumlah kampung akses rumah tungku	40 orang			Keluaran	Jumlah kampung akses rumah tungku	40 orang	
			Hasil	Prosentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat terpenuhi	20			Hasil	Prosentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat terpenuhi	20	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional/Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	34.885.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional/Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	34.885.000	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga	10			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga	10	
			Hasil					Hasil			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	100.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	100.000.000	
			Keluaran	Jumlah lokasi di survey epidemiologi	10			Keluaran	Jumlah lokasi di survey epidemiologi	10	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4			Hasil	Prosentase Pemenuhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Distrik Lereh dan Airu	Masukan	Dana	470.815.650	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Distrik Lereh dan Airu	Masukan	Dana	470.815.650	
			Keluaran	Jumlah kunjungan ke Kampung sangat terpencil/daerah sulit yang mendapat pelayanan kesehatan terpadu	10			Keluaran	Jumlah kunjungan ke Kampung sangat terpencil/daerah sulit yang mendapat pelayanan kesehatan terpadu	10	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	830.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	830.000.000	
			Keluaran	Jumlah Daerah Fokus Fogging	40			Keluaran	Jumlah Daerah Fokus Fogging	40	
			Keluaran	Jumlah alat Fogging dan bahan fogging	15			Keluaran	Jumlah alat Fogging dan bahan fogging	15	
			Keluaran	Jumlah Pasien Kusta dan Frambusia diobati	50			Keluaran	Jumlah Pasien Kusta dan Frambusia diobati	50	
			Keluaran	Angka Parasetol insidens Kab Jayapura/1000 pddk	90			Keluaran	Angka Parasetol insidens Kab Jayapura/1000 pddk	90	
			Keluaran	Persentase penanganan ISPA pada balita	70			Keluaran	Persentase penanganan ISPA pada balita	70	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mikrofilaria rate dibawah 1 %	20			Keluaran	Jumlah Puskesmas yang mikrofilaria rate dibawah 1 %	20	
			Hasil					Hasil			
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Masukan	Dana	8.152.861.500	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Masukan	Dana	8.152.861.500	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	20			Keluaran	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan kesehatan bersumber dari BPJS	20	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	20			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	20	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Masukan	Dana	843.405.000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Masukan	Dana	843.405.000	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas Melaksanakan layanan telemedicine				Keluaran	Jumlah Puskesmas Melaksanakan layanan telemedicine		
			Hasil	Prosentase ketersediaan telemedicine di Puskesmas				Hasil	Prosentase ketersediaan telemedicine di Puskesmas		
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Masukan	Dana	18.176.975.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Masukan	Dana	18.176.975.000	
			Keluaran	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	21			Keluaran	Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan kesehatan preventif dan promotif	21	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	20			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	20	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	1.366.648.201	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	1.366.648.201	
			Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan mendapat biaya Operasional	114			Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan mendapat biaya Operasional	114	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	4			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	
			Hasil	Prosentase Puskesmas terakreditasi	80			Hasil	Prosentase Puskesmas terakreditasi	80	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Yokari, Saduyap, Airu, Pagai dan Ravenirara	Masukan	Dana	1.187.664.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Yokari, Saduyap, Airu, Pagai dan Ravenirara	Masukan	Dana	1.187.664.000	
			Keluaran	Prosentase Puskesmas terakreditasi	80			Keluaran	Prosentase Puskesmas terakreditasi	80	
			Hasil	Jumlah Sarana Kesehatan Swasta terakreditasi	2			Hasil	Jumlah Sarana Kesehatan Swasta terakreditasi	2	
			Hasil	Prosentase Akreditasi Sarana Kesehatan terpenuhi	100			Hasil	Prosentase Akreditasi Sarana Kesehatan terpenuhi	100	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	200.700.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Wil Pembangunan	Masukan	Dana	200.700.000	
			Keluaran	Jumlah Distrik yang dilakukan pendampingan program BIAS	19			Keluaran	Jumlah Distrik yang dilakukan pendampingan program BIAS	19	
			Keluaran	Persentase Kampung UCI	85			Keluaran	Persentase Kampung UCI	85	
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	20			Hasil	Prosentase Pemenuhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	20	
	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		
			Keluaran	surveilans	20			Keluaran	surveilans	20	
			Hasil		2			Hasil		2	

Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Kebutuhan Dana		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi		Jumlah Dokumen Pembangunan Kesehatan tersusun		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi		Jumlah Dokumen Pembangunan Kesehatan tersusun		2			
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		76.091.700	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		76.091.700	
			Keluaran	Jumlah Dokumen Data Dasar Kesehatan yang tersedia dalam menunjang Pencapaian standard Pembiayaan Kesehatan	1			Keluaran	Jumlah Dokumen Data Dasar Kesehatan yang tersedia dalam menunjang Pencapaian standard Pembiayaan Kesehatan	1			
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Standartisasi Pelayanan Kesehatan	40			Hasil	Prosentase Pemenuhan Standartisasi Pelayanan Kesehatan	40			
			Masukan	Dana				Masukan	Dana				
		Sentani	Masukan	Dana		138.849.000		Sentani	Masukan	Dana		138.849.000	
			Keluaran	Jumlah pertemuan SIKDA dengan Puskesmas	6			Keluaran	Jumlah pertemuan SIKDA dengan Puskesmas	6			
			Hasil	Prosentase Peningkatan Manajemen Kesehatan terpenuhi	60			Hasil	Prosentase Peningkatan Manajemen Kesehatan terpenuhi	60			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	SENTANI	Masukan	Dana		5.354.400.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	SENTANI	Masukan	Dana		5.354.400.000	
			Keluaran	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dikontrol pemerintah				Keluaran	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dikontrol pemerintah				
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10			
	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	SENTANI	Masukan	Dana		29.800.000	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	SENTANI	Masukan	Dana		25.600.000	
			Keluaran	Jumlah distrik dilakukan pengawasan tenaga kesehatan				Keluaran	Jumlah distrik dilakukan pengawasan tenaga kesehatan				
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SENTANI	Masukan	Dana			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SENTANI	Masukan	Dana		196.640.000	Penambahan DANA DAK BPOM
			Keluaran	Jumlah tenaga kesehatan terlatih	30			Keluaran	Jumlah tenaga kesehatan terlatih	30			
			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10			Hasil	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	10			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga	15		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Taman Obat Keluarga	15		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Wil Pembangunan	Masukan	Dana			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		97.745.000	Penambahan DANA DAK BPOM
			Keluaran	Jumlah Distrik yang mendapatkan pengawasan keamanan pangan	19			Keluaran	Jumlah Distrik yang mendapatkan pengawasan keamanan pangan	19			
			Hasil	Prosentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan	100			Hasil	Prosentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan	100			
	Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan, antara lain jasa boga, rumah makan, restaurant dan DAM						Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan, antara lain jasa boga, rumah makan, restaurant dan DAM						
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan, restaurant dan Depot air minum (DAM)	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		217.330.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan, restaurant dan Depot air minum (DAM)	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		217.330.000	
			Keluaran	Jumlah usaha makanan produksi rumah tangga yang memenuhi syarat	50			Keluaran	Jumlah usaha makanan produksi rumah tangga yang memenuhi syarat	50			
			Hasil	Prosentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan	100			Hasil	Prosentase Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan	100			
	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan						Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan						
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		10.000.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		10.000.000	
			Keluaran	Jumlah Sarana Distribusi/Penjualan Makanan dan Pangan yang diperiksa	8			Keluaran	Jumlah Sarana Distribusi/Penjualan Makanan dan Pangan yang diperiksa	8			
			Hasil					Hasil					
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		65.497.000	Penambahan DANA DAK BPOM
			Keluaran	Jumlah sarana IRTP yang di periksa	75			Keluaran	Jumlah sarana IRTP yang di periksa	75			
			Hasil					Hasil					
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		133.530.500	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		258.982.500	Penambahan DANA DAK BPOM
			Keluaran	Jumlah Badan Peduli Kesehatan yang dibentuk	4			Keluaran	Jumlah Badan Peduli Kesehatan yang dibentuk	4			
			Hasil	Prosentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat terpenuhi	30			Hasil	Prosentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat terpenuhi	30			
				Prosentase Balita Gizi Kurang	<10				Prosentase Balita Gizi Kurang	<10			
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		70.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Wil Pembangunan	Masukan	Dana		70.000.000	
			Keluaran	Jumlah orang mendapat Penyuluhan STBM di kampung	150			Keluaran	Jumlah orang mendapat Penyuluhan STBM di kampung	150			
			Hasil	Prosentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat terpenuhi	40			Hasil	Prosentase Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat terpenuhi	40			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat melalui mekanisme Musrenbang mulai dari tingkat kampung, lalu tingkat distrik dan tingkat kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengikuti proses Musrenbang tingkat Distrik dan menyampaikan rencana-rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 sehingga masyarakat dapat mengakses program atau kegiatan tersebut untuk daerahnya. Kemudian seluruh pengusulan tersebut di input dalam sistem SIPP Kabupaten Jayapura yang pada akhirnya dalam forum SKPD, ditampilkan dan disepakati usulan-usulan dari pemangku kepentingan mana yang akan diakomodir dalam RKPD Kabupaten Jayapura tahun 2025.

Pada usulan masyarakat. Dititikberatkan pada beberapa isu antara lain (selengkapnya pada lampiran):

- a. Peningkatan sarana dan prasarana di kampung-kampung tertentu, dimana sebagian besar kampung menginginkan pembangunan fasilitas Layanan Kesehatan dan prasarananya
- b. Penambahan Kuantitas SDM Kesehatan, antara lain tenaga medis dan paramedis. Beberapa distrik diperoleh data belum diisi oleh tenaga medis sehingga penguatan SDM kesehatan menjadi prioritas masyarakat
- c. Pelaksanaan JKN di masyarakat. Pada umumnya masyarakat meminta layanan kesehatan gratis di fasyankes. Sehingga pada musrenbang dijelaskan program pemerintah daerah dalam mendukung program nasional yaitu Jaminan kesehatan Nasional, Kartu Papua Sehat dan Jaminan Persalinan Daerah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat didorong melalui kepala distrik untuk memenuhi secara administratif persyaratan program JKN
- d. Sosialisasi Pencegahan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, Malaria dan TBC serta pengembangan kesehatan ibu dan anak.
- e. Pemenuhan sarana tempat tinggal bagi petugas kesehatan di puskesmas, agar petugas dapat melakukan pelayanan kesehatan dengan maksimal
- f. Sarana dan prasarana puskesmas dalam hal ambulance transport dan mobil jenazah. Namun dalam pembahasan tersebut, disampaikan kepada masyarakat bahwa penyediaan mobil jenazah bukan menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan, karena tidak didukung dalam sistem penganggaran.

Rincian usulan masyarakat secara lengkap pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 (TC.32) Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Jayapura (Sumber: Hasil Musrenbang Kabupaten Jayapura)

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar		
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase ketersediaan fasilitas Kesehatan di kampung		
1	Pembangunan Puskesmas	Kampung Bangai	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	1 unit	Pembangunan permanen Puskesmas Saduyap dibangai
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kampung Yakonde	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	1 unit	Sudah diusulkan tahun 2022 lewat DAK tetapi blm disetujui oleh Pusat dan akan diusulkan lagi Pengusul Bpk. Konstan Daimoy
3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Wanbena	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya(Pustu)	1 unit	Melengkapi persyaratan pembebasan Tanah dan surat pernyataan kerja sama antara pemilik tanah dankepala kampung
		Nechibe	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya(Pustu)	1 unit	Melengkapi persyaratan pembebasan Tanah dan surat pernyataan kerja sama antara pemilik tanah dankepala kampung akan didorong lewat otsus/DAU
		Sumbe, sanggai	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya(Pustu)	1 unit	Pustu sudah diusulkan dimusrembang 2019 didorong di Otsus
		Yadauw	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya(Pustu)	1 unit	Diusulkan dengan Dana DAK tahun 2025
4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Puskesmas Waibu	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 unit	Akan diusulkan melalui DAK fisik jika lokus terbuka
		PKM Ravenirara/Yonsu	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Akan didorong dari Dana Otsus
		Puskesmas Genyem	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 Unit	Dak akan diusulkan lewat DAK
		Pagai	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 unit	Rumah Kopel diprioritaskan tahun 2023
		Lapua	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 unit	Pembangunan Rumah Kopel tidak memungkinkan karna lahan Puskesmas sudah sempit
		Banga	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 unit	diusulkan tahun 2025
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kampung Abar	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Pembantu)	1 unit	Diusulkan dari Otsus bila kerusakan ringan ditangani oleh dana kampung
		Kampung Dondai	Puskesmas Pembantu	1 unit	Siapkan Sertifikat tanah akan diusulkan lewat otsus
		Kampung Ayapo	Puskesmas Pembantu	1 unit	Rehab Polindes ayapo masih cukup baik, petugas masih menetap di polindes tersebut
		Kampung Nendalsi	Puskesmas Pembantu	1 Unit	rehab pustu Dapat diusul lewat dana kampung
		Kampung Nawa Mukti,Purnawa Jati	Puskesmas Pembantu		ditampung untuk didorong lewat otsus/ rusak ringan dibantu oleh dana kampung
		Naira,Aurina	Puskesmas Pembantu	2 unit	diusulkan tahun 2024
		Kampung Oyengsi	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Kerusakan Ringan akan dibantu Oleh dana Kampung Oyengsi
		Kampung Iwon	Puskesmas Pembantu	1 unit	Diprioritaskan tahun anggaran 2023

Pemerintah Kabupaten Jayapura

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar		
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase ketersediaan fasilitas Kesehatan di kampung		
		Kampung Berat		1 Unit	Kerusakan Ringan dapat diusulnkan dengan dana kampung
		Puskesmas Kemtuk		1 Unit	Disediakan dengan dana DAK Fisik
7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	PKM Waibhu	anya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 unit	Akan diusulnkan lewat alokasi dana DAK 2025
		PKM Ravenirara/Yonsu Dosoyo	Jumlah Pusling Air tersedia	1 unit	Pengadaan Pusling Air akan di adakan melalui usulan dana dak fisik 2023
		Pustu Wahab	Jumlah Pusling Darat Tersedia	1 Unit	Pustu belum disediakan Pusling darat masih fokus pada PKM
		Bingguin Progo	Jumlah Pusling Roda Dua	1 Unit	Sudah ada kendaraan roda dua yang dipakai oleh petugas lama silahkan mengambil kendaraan tersebut ada kendala lapor ke dinas
		Garusa	Jumlah Pusling Roda Dua	2 unit	sudah ada dalam DAK tahun 2023 proses pengiriman
		PKM Demta	Jumlah Pusling Darat Tersedia	1 unit	Pengadaan Pusling Darat akan di adakan melalui usulan dana dak fisik 2023
		Namblong, Garusa, Lapua	Jumlah Mobil Jenazah	1 Unit	Bukan Kewenangan Dinas Kesehatan
		Puskesmas Kemtuk	Jumlah Sarana Air Bersih Tersedia	1 Paket	Sumber air untuk pengadaan air bersih sulit karena tanah karang akan dibiayai lewat DAK
		Puskesmas Yapsi	jumlah Pengadaan Ambulans	1 unit	Diprioritaskan tahun anggaran 2023
		Airu	Jumlah Listrik tenaga suurya	1 Paket	Diprioritaskan tahun anggaran 2023
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Dosay	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Diusulkan dari DAK 2023
		Puskesmas Nimbokrang		1 Paket	Diusulkan dari DAK 2023
		Kemtuk		1 Paket	kan diusulnkan melalui DAK Fisik tahun 2023
		Puskesmas Genyem		1 Paket	kan diusulnkan melalui DAK Fisik tahun 2023
9	Pengadaan Obat dan Vaksin	Namblong	Tersedianya Obat dan Vaksin	1 Paket	Obat adalah Pengadaan Rutin untuk semua PKM, kalau ada obat tertentu dapat diusulnkan rinci
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Karya Bumi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Malaria Sesuai Standar	1 Kampung	penanggulangan Malaria Alat dan Bahan Disiapkan Oleh Dinas Kampung Membiayai Tenaga dari Kampung siapkan surat permintaan ke Dinas
		Kemtuk Gresi		12 kampung	penanggulangan Malaria Alat dan Bahan Disiapkan Oleh Dinas Kampung Membiayai Tenaga dari Kampung siapkan surat permintaan ke Dinas
		Kemtuk Gresi		12 Kampung	Pengadaan Kelambu akan diusulnkan dalam DAK 2023
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Namblong	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	5 kampung	Sudah Menjadi Program Kegiatan BOK Puskesmas
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		
	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM		Terpernuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Terpernuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas		
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Depapre		1 dokter gigi	Belum ada tenaga dokter gigi yang tersedia
		Yapsi		1 Dokter Gigi	Belum ada tenaga dokter gigi yang tersedia
		Tablasupa		1 Bidan, 1 Perawat	Akan disiapkan sesuai ketersediaan tenaga
		Kandate		1 Bidan, 1 Perawat	Akan disiapkan sesuai ketersediaan tenaga
		Ravenirara/Yonsu Dosoyo		semua tenaga dipuskesmas	sudah disiapkan tahun ini melalui dana Otsus
		Muara Nawa		1 Perawat	Nakes sudah ada siap ditempatkan
		Naira		2 Perawat	Nakes sudah ada siap ditempatkan
		Kamikaro		3 Perawat	Nakes sudah ada siap ditempatkan

BAB III. TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JAYAPURA

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Jayapura

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JAYAPURA

BAB V. PENUTUP

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

3.1.1 Kebijakan nasional Sektor Kesehatan

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Kementerian Kesehatan RI mendukung tercapainya Indonesia Emas tahun 2045 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Indonesia Sehat merupakan salah satu sasaran transformasi sosial untuk Indonesia Emas 2045, melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat dengan target stunting di bawah 5% dan menuntaskan TBC dan Kusta.

Upaya transformatif kesehatan untuk semua sejalan dengan program transformasi kesehatan yang saat ini diupayakan oleh Kementerian Kesehatan. Melalui Penguatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; Pengembangan pelayanan kesehatan primer sampai tingkat desa dan kelurahan; Jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting; Pendidikan dokter spesialis berbasis RS dan percepatan masa produksi dokter; Pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Adapun 6 pilar transformasi kesehatan tersebut antara lain :

1. Transformasi Layanan Primer.

Pilar transformasi ini mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat.

2. Transformasi Layanan Rujukan.

Pilar transformasi ini berfokus pada perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat.

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan.

Pilar transformasi ini meliputi upaya dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan.

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan.

Pilar transformasi ini berfokus untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan. Melalui pengembangan regulasi pembiayaan kesehatan dengan tujuan membangun pemerataan, kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, keberlanjutan alokasi pembiayaan, serta pemanfaatan yang efektif dan efisien.

5. Transformasi SDM Kesehatan.

Pilar transformasi ini meliputi upaya dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan. Inisiatif yang dilakukan salah satunya adalah dengan menambah kuota mahasiswa kedokteran agar kemudian terjadi peningkatan jumlah dokter dan dokter spesialis yang merata di seluruh Indonesia.

6. Transformasi Teknologi Kesehatan.

Pilar transformasi terakhir mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

3.1.2 Kebijakan Provinsi Papua

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yakni “Papua Sehat yang Berkeadilan” maka harus didukung dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat, selaras dan konsisten dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan dan kemandirian yang berkeadilan Masyarakat adalah penerima pelayanan dan sekaligus sebagai pelaku pelayanan kesehatan sampai di daerah terpencil dan terisolir demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

Menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui Pelayanan Kesehatan bergerak kaki telanjang.

- 2) Intervensi berbasis/ pendekatan wilayah (berbasis kewilayahan)

Keragaman etnis dan budaya serta karakteristik wilayah mengharuskan program pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan berbasis wilayah, sehingga intervensi pelayanan di 5 wilayah adat yang meliputi Wilayah Adat Mamta yang meliputi Kabupaten Jayapura, Keerom, Membramo Raya dan Kota Jayapura, Saereri yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen, Ha Anim meliputi Kabupaten Merauke, Bovendigoel, Mappi, Asmat dan Mimika, Mee Pago meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai dan La Pago yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, Puncak Jaya, Nduga dan Puncak.

- 3) Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan (continuum of care)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional
Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui peningkatan disiplin, kinerja dan kapasitas aparatur serta penerapan SAKIP secara konsisten.

3.1.3 Isu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP)

RIPP TAHUN 2041 memiliki isu kesehatan dalam mencapai Papua Sehat terdiri dari :

- 1) Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan perbaikan gizi masyarakat
- 2) Mempercepat pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Papua
- 3) Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup sehat
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
- 5) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan
- 6) Meningkatkan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan
- 7) Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman
- 8) Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan

3.1.4 Kebijakan Kabupaten Jayapura

Mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021, yang mana mengarahkan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada: (1) visi-misi RPJPD, (2) analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat, (3) isu-isu strategis actual.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPDT) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Intruksi Menteri dalam Negeri tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada analisis isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Tujuan strategis Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi

Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam mempercepat capaian pembangunan manusia sehingga tercipta kualitas manusia yang tinggi. Tercakup didalamnya upaya pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan prestasi pemuda dan olah raga

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera

Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social dalam masyarakat. Tercakup di dalamnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan ekonomi pedesaan, pengembangan UMKM dan industri rumah tangga.

3. Mewujudkan masyarakat sadar hukum, ketertiban umum dan Kesatuan Bangsa

Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam menguatkan kualitas masyarakat dari segi tertib social. Tercakup di dalamnya upaya-upaya pemeliharaan ketertiban umum, perwujudan masyarakat sadar hukum dan moral, penguatan harmoni social antar etnis, kerukunan antar umat beragama, dan wawasan kebangsaan.

4. Mewujudkan masyarakat dan kampung adat yang berdaya

Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam menguatkan kualitas masyarakat dari segi eksistensi lembaga adat dan kebudayaan daerah. Sebagaimana diketahui Papua secara umum dan Kabupaten Jayapura secara khusus dicirikan oleh sejarah dan eksistensi masyarakat adat serta produk-produk kebudayaan daerah yang spesifik. Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam menguatkan peran lembaga adat dalam berbagai aspek kehidupan, pengembangan kampung adat, dan revitalisasi produk-produk kebudayaan local/daerah, serta pemenuhan terhadap kewenangan dan hak atas pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Hukum Adat.

5. Mewujudkan jangkauan infrastruktur yang luas dan merata

Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas wilayah dari segi keterbukaan interkoneksi wilayah sehingga seluruh sub-wilayah/lokasi yang terisolasi dapat terbuka aksesnya. Tercakup di dalamnya upaya-upaya penataan ruang, pengembangan infrastruktur transportasi,

pengembangan infrastruktur perhubungan, pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman, pengembangan kawasan pertanian/agropolitan, pengembangan kawasan industri, pengembangan kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan.

6. Mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas daerah dari segi kelestarian lingkungan hidup. Tercakup di dalamnya upaya-upaya dalam memelihara sumberdaya hutan dan daerah aliran sungai, pengelolaan sumberdaya air, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan bencana serta Pengelolaan Persampahan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan ini mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Pemerintah adalah pilar utama dalam pencapaian pembangunan secara berkelanjutan sehingga perlu diperkuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Tercakup dalam tujuan ini upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalisme ASN, menata administrasi keuangan, pelaporan kinerja pelayanan, penyelegaraan pemerintahan distrik, penyelenggaraan pemerintahan kampung, perencanaan dan pengawasan pembangunan serta legislasi daerah, termasuk didalamnya adalah upaya-upaya untuk memperkuat Distrik sebagai pusat pelayanan public, pusat pemberdayaan, pusat pelatihan, pusat data dan informasi, pusat inovasi dan pengetahuan, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan

Pemerintah Kabupaten Jayapura

bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura melalui sektor kesehatan dilakukan melalui Misi 1 yaitu Meningkatkan Kualitas manusia antara lain dijelaskan dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Impact)	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Kinerja Tahun-					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	M.1. Meningkatkan kualitas manusia	T.1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72.10	72.11	72.12	72.13	72.14	72.14	Dinas Pendidikan, Perustakaan, Kesehatan, KB, Perindag, Koperasi, Pariwisata, TPH, Perkebunan dan Peternakan, kelautan dan Perikanan
			S.1. Meningkatnya derajat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat	Indeks Pendidikan								Dinas Pendidikan; Perpustakaan
			S.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	%	73.10	73.20	73.21	73.22	73.23	73.23	Dinas Kesehatan
			S.3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita								Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perdagangan; Setda (Bagian Ekonomi)
2	M.7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	CC=50,33	CC=50,33	B	B	B	BB	BB	OPD Pelayanan Publik
			S 7.3: Terpenuhinya standar pelayanan umum	Indeks Reformasi Birokrasi		100	100	100	100	100	100	OPD Pelayanan Publik

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa untuk mewujudkan kualitas manusia Memiliki Satu Tujuan yaitu meningkatkan derajat pendidikan, derajat kesehatan dan daya saing tenaga kerja dengan sasaran pembangunan sektor kesehatan yaitu Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan 30 Indikator Kinerja selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan sehingga hasil Indikator tersebut akan menggambarkan kualitas manusia yang meningkat.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, reasonable, time-bound (SMART-C)*.

Dalam mewujudkan sasaran RPD maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura guna mendukung tercapainya harapan RPD antara lain :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026 untuk mendukung
 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jayapura 2023-2026

Tujuan 1 RPD Kab Jayapura : **Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi**

Sasaran 2 RPD Kab Jayapura : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang merata										
			S1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar sampai ke daerah terpencil dan masyarakat terasing.	Prosentase Kampung/ kelurahan mendapat pelayanan Kesehatan Dasar	78	80	82	85	87	90	90	Dinas Kesehtan
			S2: Tersedianya Fasilitas Layanan Kesehatan yang memadai merata dan terakreditasi	Prosentase Puskesmas Terakreditasi	71	76	80	90	100	100	100	Dinas Kesehtan
			S3: Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	Ketersediaan Obat	97	98	98	100	100	100	100	Dinas Kesehtan

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	S1: Terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Menular	19	21	22	22	22	22	22	Dinas Kesehatan
			S2: Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Tidak menular	Puskesmas melaksanakan layanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	19	21	22	22	22	22	22	Dinas Kesehatan
			S3: Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	167,45	150	130	120	100	90	90	Dinas Kesehatan
			S4: Terlaksananya Upaya Kesehatan bagi Bayi dan Balita	Angkat Kematian Bayi per 1000 KH	20	18	16	14	12	10	10	Dinas Kesehatan
			S5: Terwujudnya perbaikan gizi masyarakat	Prosentase Stunting	32	15	14	13	12	11	11	Dinas Kesehatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T2: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	S6: Terwujudnya Lingkungan yang sehat di Masyarakat	Prosentase Kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan	30,6	35	40	45	50	55	55	Dinas Kesehatan
			S7: Terlaksananya Layanan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja, dan Lanjut Usia	Prosentase Puskesmas Melaksanakan SPM Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		T3: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Kesehatan	S1: Terlaksananya Layanan Posyandu	Rasio Posyandu per Satuan balita	47,99	45	43	40	38	35	35	Dinas Kesehatan
			S2: Terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Prosentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja (tujuan, impact, outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Program Pembangunan Daerah	Tujuan	Sasaran		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		T3: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Kesehatan	S3: Terwujudnya Deteksi Dini di semua masalah kesehatan dan tertanggulangnya KLB, wabah dan bencana	Cakupan kampung/kel mengalami KLB dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiolog dan penanganan <24 jam	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		T4: Meningkatkan Pemerataan sumber daya Kesehatan	S1: Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tersertifikasi	Prosentase Puskesmas yang minimal memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan	85,71	87	90	92	95	97	97	Dinas Kesehatan
		T5: Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	S1: Terwujudnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.	Prosentase Masyarakat dijamin oleh Jaminan Kesehatan	95	97	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Jayapura, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023 yang termuat dalam Strategi dan Arah kebijakan tahun 2023-2026 dibawah ini :

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi-1: Meningkatkan kualitas manusia.							
Meningkatkan kualitas hidup manusia.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Penenuhan standar pelayanan Minimal kesehatan Melalui peningkatan akses serta kualitas layanan dalam pencapaian Jayapura Sehat dan mandiri	Peningkatan akses dalam Pencapaian SPM Kesehatan	Penguatan Sumber Daya dalam Pencapaian SPM Kesehatan	Pemerataan S Daya Layanan Kesehatan serta kualitas layanan	Pemerataan Layanan Kesehatan serta kualitas layanan	Pengembangan Sistem Layanan Kesehatan

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*).

Pada Sektor Kesehatan, strategi termuat dalam strategi No.2 yaitu Promosi pola hidup sehat secara bersinergi dengan pemenuhan standar pelayanan kesehatan minimal yang didukung oleh kecukupan sarana-prasarana dan tenaga kesehatan dan strategi No. 9 yaitu Perbaikan tatakelola dan reformasi birokrasi secara beriringan dengan penguatan distrik sebagai pusat pelayanan.

Pembangunan kesehatan untuk peningkatan kualitas manusia dipahami dalam dua dimensi yang bersinergi, yakni mendorong pola hidup sehat dalam masyarakat dan melayani masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan. Promosi pola hidup sehat merupakan strategi pencegahan melalui kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan strategi penanggulangan dengan fokus pada upaya pencapaian standar pelayanan minimal. Strategi ini diharapkan dapat menangani dengan akurat realitas masalah kesehatan yang spesifik di Kabupaten Jayapura yakni masalah kesehatan yang tercakup dalam standar pelayanan minimal serta masalah spesifik lainnya seperti penyakit malaria, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, hipertensi, diabetes melitus, tubercolosis, gangguan jiwa berat dan HIV/AIDS serta pengelolaan potensi obat asli.

Sedangkan Arah Kebijakan tahun 2023 adalah *“Pemberdayaan masyarakat adat dengan didukung oleh perbaikan kualitas manusia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat”*.

3.3 Program dan Kegiatan

Penentuan program dan kegiatan memperhatikan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2023-2026, prioritas pembangunan kesehatan nasional tentang Transformasi kesehatan yang tercantum pada Renstra Kementerian Kesehatan RI dan prioritas pembangunan kesehatan Provinsi yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua, selain itu memperhatikan isu strategis dan potensi masalah bidang kesehatan yang menonjol terjadi di Kabupaten Jayapura dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Program dan kegiatan yang disusun juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, terutama pada strategi pengembangan kawasan peruntukan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan. Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra Dinas Kesehatan dengan RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Jayapura :

1. Peningkatan pelayanan Kesehatan dasar
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat

3. Peningkatan pelayanan Kesehatan dasar khusus OAP

Perumusan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada tahun 2023 mengacu pada RKPD tahun 2023. Maka dapat dirumuskan bahwa program 2023-2026 merupakan kelanjutan, pengembangan, penggabungan perbaikan maupun perumusan program baru/inovasi dari program yang telah dilaksanakan. Program pada masa 2023-2026 merupakan program prioritas bidang kesehatan yang memiliki indikator kinerja dan target capaian kinerja serta dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan terutama yang mendukung pencapaian Visi, misi tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Jayapura

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Jayapura

Mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Revisi RPD Kabupaten Jayapura tahun 2023 – 2026, Sebagai dokumen perencanaan pada tahun antara RPD, pada pelaksanaannya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana kerja tahunan (Renja PD) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan alokasi dana PD pertahun. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan PD diawali dengan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten dimana masukan perencanaan dari tingkat Distrik dan Kampung dapat diakomodir dan diselaraskan dengan perencanaan dari masing-masing PD serta Pagu Alokasi anggaran dari BAPPEDA Kabupaten dan selanjutnya dihasilkan rumusan Dokumen Renja PD tahunan.

Dokumen rencana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2025 memuat informasi tentang : sasaran yang dicapai selama Tahun 2023, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Terdapat penyesuaian oleh karena telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga merubah Jenis program dan kegiatan yang sejak 2018 s.d 2020 menggunakan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dilakukan Mapping pelaksanaan program dan kegiatan sektor kesehatan sebagaimana terdapat dalam lampirannya.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Yaitu sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2025 beserta indikator dan rencana tingkat capaian (targetnya). Dalam Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kab. Jayapura mengacu pada 20 sasaran strategis Kesehatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2023-2026

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategic dan yang akan mewujudkan sasaran yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2025 merencanakan kinerja dalam 5 Program Kesehatan sesuai Permendagri 86/2017 yaitu :

NO	PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yaitu tahun 2025 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Pada Rencana Kerja 2025 menetapkan 92 Kegiatan baik di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. (secara rinci terlampir).

4. Indikator kinerja kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

- Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya
- Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan

- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Pada RPD 2023-2026 dan SPM Kesehatan.

Rencana kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam matriks rencana kinerja tahunan (RKT) memuat seluruh kegiatan, *selengkapnya pada Lampiran*.

Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

- a. Dalam kaitannya dengan indikator SDG's, Dinas Kesehatan Kab. Jayapura akan terus memfokuskan kinerja dalam menurunkan angka kematian anak, meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, dan penanggulangan penyakit AIDS, malaria serta penyakit lainnya.
- b. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang SPM Kesehatan Dinas Kesehatan kab. Jayapura, maka perumusan program dan kegiatan tahun 2023 sebesar-besarnya dalam pemenuhan target cakupan SPM Nasional Permenkes 4/2019, dan Program Prioritas Nasional.
- c. Pelaksanakan dukungan dalam Penurunan Kemiskinan ekstrim
- d. Kabupaten Jayapura masih memiliki kampung-kampung yang belum dilayani secara menyeluruh oleh sektor kesehatan oleh karena beberapa faktor seperti keterbatasan SDM kesehatan serta infrastruktur yang terbatas. Namun dengan pendekatan program/kegiatan Layanan dokter Mobile/Terbang maka diharapkan kampung – kampung terisolir layanan kesehatan dapat dijangkau oleh petugas secara komprehensif sehingga usia harapan hidup di kabupaten jayapura meningkat.
- e. Berdasarkan amanat Gubernur papua yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Papua No.8 tahun 2014 dalam mengembangkan kesehatan masyarakat asli papua dan masyarakat papua umumnya, maka dengan Dana OTSUS, direncanakan program/kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat guna mencapai peningkatan erajat kesehatan yang mandiri.
- f. Program stunting dengan target penurunan 1 % /tahun sesuai Peraturan Bupati
- g. Jaminan Kesehatan Nasional

4.2 Pendanaan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Dana yang ditetapkan sebagai pagu Dinas Kesehatan dan Puskesmas tahun anggaran 2025 adalah :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a. Sumber Dana PAD | : Rp. 8.092.905.121 |
| b. Sumber Dana OTSUS | : Rp. 12.000.000.000 |
| c. Sumber Dana DAK Fisik/Penugasan | : Rp. 15.400.000.000 |
| d. Sumber Dana DAK Non Fisik | : Rp. 8.771.483.800 |
| e. Sumber Dana DAU | : Rp. 51.259.581.796 |
| f. Sumber Dana DAU SG | : Rp. 48.015.753.825 |
| g. Sumber Dana DBH | : Rp. 270.300.000 |
| h. Sumber Dana BHP Provinsi | : Rp. 8.861.488.775 |

Sehingga Total anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura adalah **Rp. 154.073.502.515**

Sedangkan Pada UPTD Puskesmas, pengelolaan anggaran dengan Sumber Dana DAK Non Fisik/BOK Puskesmas dan PAD/ Kapitasi dan Non Kapitasi JKN serta DAU SG adalah Rp. **40.147.273.121.**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
													Target	Anggaran	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%								
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		8	215.073.700			8	139.810.000	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	Sentani	1	85.630.900	DAU		1	61.270.000	61.270.000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Sentani	1	50.000.000	DAU		1	27.500.000	27.500.000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Sentani	5	29.589.000	DAU		5	27.280.000	27.280.000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Sentani	1	49.853.800	DAU		1	23.760.000	23.760.000
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%			51.029.881.796				63.077.910.000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Sentani	11220	50.759.581.796	DAU		11.220	62.424.510.000	62.424.510.000
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Sentani	1	270.300.000	DBH		1	653.400.000	653.400.000
1	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000				24.000.000	
1	02	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10 Distrik	1	50.000.000	DAU		1	24.000.000	24.000.000
1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%			445.000.000				310.610.000	
1	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Sentani	1	75.000.000	DAU		1	18.150.000	18.150.000
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Sentani	1	100.000.000	DAU		1	18.150.000	18.150.000
1	02	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	orang	Sentani	1		DAU				
1	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	Sentani	5	20.000.000	DAU		5	27.500.000	27.500.000
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	Sentani	40	150.000.000	DAU		40	170.998.000	170.998.000
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	18 Distrik	96	100.000.000	DAU		96	75.812.000	75.812.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Umum Perangkat Daerah	%			823.391.498				454.972.900	
1	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Sentani	1	5.000.000	DAU		1	5.500.000	5.500.000
1	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	Sentani	10	200.000.000	DAU				
1	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	Sentani	1	21.439.149	DAU		1	18.150.000	18.150.000
1	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	Sentani	1	200.000.000	DAU		1	133.697.000	133.697.000
1	02	01	2,06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	Sentani	1	34.670.000	DAU		1	39.455.900	39.455.900
1	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan UU	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Dokumen	Sentani	1	3.000.000	DAU		1	3.630.000	3.630.000
1	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Sentani	1	34.909.400	DAU		1	42.240.000	42.240.000
1	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Sentani	1	324.372.949	DAU		1	212.300.000	212.300.000
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	%			150.000.000				100.000.000	
1	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	Sentani	10	100.000.000	DAU				
1	02	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Sentani	12	50.000.000	DAU		25	100.000.000	100.000.000
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	%			13.274.000				53.148.700	
1	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Sentani	1	-	DAU		1	513.700	513.700
1	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Sentani	1	6.864.000	DAU		1	43.560.000	43.560.000
1	02	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	Sentani	1	6.410.000	DAU		1	9.075.000	9.075.000
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			205.250.000				317.758.100	
1	02	01	2,09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Sentani	7	90.000.000	DAU		9	240.758.100	240.758.100
1	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Sentani	30	100.000.000	DAU		32	77.000.000	77.000.000
1	02	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	paket	Sentani	1	15.250.000	DAU				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
													Target	Anggaran	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM sesuai standar	%								
1	02	02	2,01		Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan fasilitas Kesehatan di kampung				39.981.075.600				26.385.720.000	
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	unit								
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	Distrik	2	5.832.000.000	OTSUS/DAK/DAU SG		5	4.500.000.000	4.500.000.000
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	unit	Distrik	3	5.000.000.000	OTSUS/DAU SG		10	5.500.000.000	5.500.000.000
1	02	02	2,01	06	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	Set	Distrik	10	9.600.000.000	DAK/DAU SG				
						Tersedianya solar cell di pustu	unit	Distrik		1.200.000.000	DAK/DAU SG				
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	unit	Distrik	7	5.000.000.000	DAU SG				
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	Distrik	1	4.800.000.000	DAK		2	900.000.000	900.000.000
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	Distrik	3	800.000.000	DAU SG		4	1.000.000.000	1.000.000.000
1	02	02	2,01	12	Pengadaan sarana fasilitas Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Distrik			DAK		1	900.000.000	900.000.000
1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PKM						12	2.750.000.000	2.750.000.000
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	15 Distrik	20	2.000.000.000	DAK		25	3.500.000.000	3.500.000.000
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin peralatan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Unit	19 Distrik	30	100.000.000	DAK		50	15.000.000	15.000.000
1	02	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	19 Distrik	1	350.000.000	DAU		1	269.720.000	269.720.000
1	02	02	2,01	23	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,vaksin, makanan dan minumandi fasilitas kesehatan	Tersedianya obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,vaksin, makanan dan minumandi fasilitas kesehatan	Paket	19 Distrik		5.199.075.600	DAK/DAU SG		1	6.930.000.000	6.930.000.000
1	02	02	2,01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Orang	19 Distrik	56600	100.000.000	DAU SG		60000	121.000.000	121.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
													Target	Anggaran	
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat	%			75.718.180.815				25.872.220.000	
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau berpotensi bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	19 Distrik	1	50.000.000	DAU SG		1	4.950.000.000	4.950.000.000
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	19 Distrik	1	7.483.429.900	DAK/DAU SG		1	913.220.000	913.220.000
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	19 Distrik	1	100.000.000	DAU SG		1	60.500.000	60.500.000
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	19 Distrik	1	1.464.285.000	DAK/DAU SG		1	385.000.000	385.000.000
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Dokumen	19 Distrik	1	502.720.000	DAK/DAU SG		1	132.000.000	132.000.000
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Dokumen	10 Distrik	1	50.000.000	DAU SG		1	27.500.000	27.500.000
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	19 Distrik	1	1.642.103.000	DAK		1	165.000.000	165.000.000
1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan Napza	Tersedianya dokumen pelayanan kesehatan kejiwaan masyarakat	Dokumen	19 Distrik	1	100.460.000	DAK				
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	kampung	Airu, Ravenirara	1	-	OTSUS		2	605.000.000	605.000.000
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	19 Distrik	1	6.125.184.070	DAK/DAU SG		1	2.420.000.000	2.420.000.000
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	19 Distrik	1	33.463.728.017	DAU SG/BHP PROV		1	8.789.000.000	8.789.000.000
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit (otensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional)	Tersedianya sampel untntuk diperiksa	Sampel	19 Distrik	1	50.000.000	DAK				
1	02	02	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dokumen	19 Distrik	1	100.000.000	DAU SG		1	825.000.000	825.000.000
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	19 Distrik	1	12.570.040.970	DAU SG		1	2.805.000.000	2.805.000.000
						Tersedianya dokumen operasional kendaraan Lapangan	Dokumen	19 Distrik	1	50.000.000	DAU SG				
						Tersedianya Petugas Keamanan	Orang	19 Distrik	50	924.000.000	DAU SG				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
													Target	Anggaran	
1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	19 Distrik	1	942.542.000	DAK/DAU SG		1	2.750.000.000	2.750.000.000
						Tersedianya dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan PMI	Dokumen	Sentani	1	400.000.000	DAU SG/BHP PROV				
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Unit	19 Distrik	5		DAK		7	550.000.000	550.000.000
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	19 Distrik	1	238.315.000	DAK		1	330.000.000	330.000.000
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan respon wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	19 Distrik	1	50.000.000	DAU SG		1	165.000.000	165.000.000
1	02	02	2,02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	Sentani	1	300.000.000	DAU SG				
1	02	02	2,02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya pelayanan sesuai standar bagi orang dengan penyakit Malaria	Orang	19 Distrik		4.150.998.658	DAK/DAU SG/OTSUS				
1	02	02	2,02	46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Tersedianya dokumen pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dokumen	19 Distrik	1	4.960.374.200	DAK				
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Dokumen			1.017.211.295				766.000.000	
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	19 Distrik	1	-	DAU		1	66.000.000	66.000.000
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	19 Distrik	1	1.017.211.295	DAU SG		1	700.000.000	700.000.000
1	02	02	3,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%		100	1.304.697.600				5.596.165.000	
1	02	02	3,02	44	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan manajemen puskesmas	Dokumen	19 Distrik		559.997.600	DAU SG				
1	02	02	3,02	48	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumun tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	Tersedianya dokumen Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, pelayanan telemedicine dan pelayanan kesehatan lainnya	orang	19 Distrik	47000	480.000.000	OTSUS		47000	3.221.350.000	3.221.350.000
1	02	02	3,02	54	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar	orang	19 Distrik	12	50.000.000	DAU SG		12	567.365.000	567.365.000
1	02	02	3,02	57	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat	kampung	19 Distrik	144	214.700.000	DAU SG		144	1.807.450.000	1.807.450.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolak Ukur Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
													Target	Anggaran	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%								
1	02	03	2.02		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota		Orang			7.063.889.000				10.516.000.000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	19 Distrik	170	6.697.700.000	OTSUS/DAU SG		170	10.450.000.000	10.450.000.000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan SDMK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	19 Distrik	1	366.189.000	DAU SG/DAK		1	66.000.000	66.000.000
1	02	03	2.03		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Orang			5.390.635.868				121.000.000	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kabupaten Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	19 Distrik	50	5.390.635.868	DAK/OTSUS		50	121.000.000	121.000.000
					Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di		orang		22	-			22	34.606.440	34.606.440
					Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang	19 Distrik	22	-	DAU SG		22	34.606.440	34.606.440
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah pelaku Usaha farmasi, alkes dan makanan minuman memenuhi syarat	Orang								
1	02	04	2.01		Pemberian Ijin apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optik, usaha mikro obat tradisional					200.000.000				153.010.000	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotik ,Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optik, usaha mikro obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	19 Distrik	1	200.000.000	DAU SG		1	153.010.000	153.010.000
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat produksi pangan IRT dan Nomor PIRT sebagai Ijin produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga					192.275.000				73.700.000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor -PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapatdiproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	19 Distrik	1	192.275.000	DAK		1	73.700.000	73.700.000
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									-	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	19 Distrik	1		DAK		1		
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					-				-	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	19 Distrik							
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pasar pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Jumlah sarana industri rumah tangga yang diperiksa				220.626.000				-	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post market pada produk makanan-miniman Pada Produksi Rumag tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	19 Distrik		220.626.000	DAK				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan Tolok Ukur Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
													Target	Anggaran	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
1	02	05	2.01		Advokasi pPemberdayaan , kemitraan, peningkatan peras serta masyarakat dan lintas sektor daerah kabupaten/kota	Jumlah distrik terlaksana peran serta kemitraan masyarakat			283.571.000					202.070.000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	19 Distrik	1	283.571.000	BHP PROV		1	202.070.000	202.070.000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000					110.000.000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	19 Distrik	1	120.000.000	DAU SG		1	110.000.000	110.000.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Standar Minimal Kesehatan Masyarakat	%			6.585.363.464				28.325.000.000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	orang	19 Distrik	2597	1.210.134.000	DAU SG		2.856	3.520.000.000	3.520.000.000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	orang	19 Distrik	3613	448.954.000	DAU SG		3.974	3.850.000.000	3.850.000.000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	orang	19 Distrik	3613	37.024.904	DAK		3.974	3.245.000.000	3.245.000.000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai standar	orang	19 Distrik	13011	100.000.000	DAU SG		14.312	1.815.000.000	1.815.000.000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	orang	19 Distrik	20933	1.074.125.000	DAU SG		23.026	1.650.000.000	1.650.000.000
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	orang	19 Distrik	110376	116.265.000	DAU SG		121.414	2.090.000.000	2.090.000.000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesahatan Usia Lanjut Sesuai Standar	orang	19 Distrik	6052	100.000.000	DAU SG		6.658	1.650.000.000	1.650.000.000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	orang	19 Distrik	3347	139.579.000	DAU SG		3.682	1.980.000.000	1.980.000.000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	orang	19 Distrik	2543	295.000.000	DAK/DAU SG		2.798	1.760.000.000	1.760.000.000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan jiwa berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	19 Distrik	190	100.000.000	DAU SG		209	1.595.000.000	1.595.000.000
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesahatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Orang	19 Distrik	365	1.843.771.560	DAK/DAU SG		402	2.420.000.000	2.420.000.000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	orang	19 Distrik	45465	1.120.510.000	DAK/DAU SG		50.011	2.750.000.000	2.750.000.000
					TOTAL					191.009.396.636				162.633.701.140	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan komitmen dari Kepala Dinas dan seluruh staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura untuk dilaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Jayapura. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Sebagai suatu Dinas di Kabupaten Jayapura yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kinerja pembangunan bidang kesehatan yang telah dibentuk ini diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi segala kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya diharapkan agenda pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.

Dalam kaitannya dengan anggaran, apabila ketersediaan anggaran berbeda dengan kebutuhan, maka akan dilakukan beberapa proses lanjutan perencanaan yaitu penetapan Rencana Kerja Anggaran yang memuat kegiatan prioritas masyarakat sesuai dengan juknis masing-masing sumber pembiayaan.

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Jayapura Tahun Anggaran 2025 Aplikasi SIPD
2. Tabel TC.29
3. Tabel TC.30
4. Tabel TC.31
5. Tabel TC.32
6. Data Dasar DAK bidang Kesehatan tahun 2025
7. Rekapitan Usulan Program/Kegiatan Distrik se-Kabupaten Jayapura hasil Musrenbang Kabupaten Jayapura dari SIPD RI
8. Indikator RPD Kab Jayapura 2023-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kab Jayapura 2023-2026
9. Rincian Sub Kegiatan pada Program dan kegiatan tahun anggaran 2025